

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG) DI KSPPS BMT BINA UMMAT
SEJAHTERA (BUS) CABANG LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh

IRBAH EKA SANIYYAH

NIM : G94219161



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Irbah Eka Saniyyah, G94219161, menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan benar-benar merupakan hasil karya diri sendiri, bukan hasil karya orang lain, dibuat atas nama saya dan bukan hasil menjiplak atau menjiplak karya orang lain (plagiat). Karya ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya atau perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini tidak memuat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara jelas dicantumkan dalam tulisan dengan menyebutkan nama pengarang sebagai acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya kirimkan dengan sebenar-benarnya dan saya juga bersedia menerima sanksi ilmiah apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan kebohongan dalam pernyataan ini, seperti pencabutan gelar yang diberikan atas karya ini, serta sanksi lainnya sesuai standar dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 12 April 2023



Irbah Eka Saniyyah

NIM. G94219161

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 12 April 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk di uji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iqbal', written in a cursive style.

Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) CABANG LAMONGAN

Oleh

Irbah Eka Saniyyah

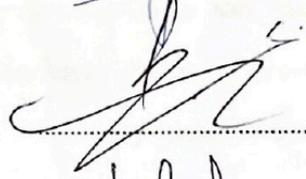
NIM : G94219161

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada
tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. M. Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI
NIP. 199103162019031013
(Penguji 1)
2. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
NIP.198106062009012008
(Penguji 2)
3. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP.198509042019031005
(Penguji 3)
4. Ismatul Khayati, ME
NIP. 199010132022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 29 Mei 2023



Arifin S.Ag., S.S., M.E.I

NIP. 1970051420000310014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Irbah Eka Saniyyah**
NIM : **G94219161**
Fakultas/Jurusan : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah**
E-mail address : **Irbaheka08@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG) DI KSPPS BMT BINA UMMAT
SEJAHTERA (BUS) CABANG LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(**Irbah Eka Saniyyah**)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Sebagai lembaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance(GCG) saat melakukan tindakan bisnis perlu mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, praktik kehati hatian, tanggung jawab(responsibility), objektivitas, kebebasan memilih harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis (independency) Senantiasa memperhatikan prinsip kesetaraan dan kewajaran (fairness). KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan sebagai lembaga keuangan mikro juga harus memiliki standart tersebut untuk menghindari potensi risiko.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan serta hambatan penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik di KSPPS Cabang Lamongan dengan memberikan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode di mana komunikator utama adalah Kepala Cabang dan Manajer Operasional.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan serta Kewajaran. Namun masih ada prinsip yang belum sepenuhnya dilaksanakan yakni prinsip akuntabilitas. Meskipun terdapat keterbatasan atau kendala dalam penerapan GCG, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan mengalami faktor internal yaitu kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya, dan upayanya adalah menerapkan kedisiplinan kepada pegawai menjadi lebih disiplin serta memberikan penghargaan kepada karyawan dengan kedisiplinan tinggi.

Penelitian tersebut dapat memberikan saran penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dan calon anggota serta lebih memajukan dan memperluas pengembangan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.

Kata Kunci : Prinsip Good Corporate Governance, KSPPS, BMT BUS.

ABSTRACT

As an institution the principles of good corporate governance (GCG) when carrying out business actions need to follow the principles of transparency, accountability, prudent practices, responsibility (responsibility), objectivity, freedom of choice must be considered in running a business (independence) Always pay attention to the principles equality and fairness. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lamongan Branch as a microfinance institution must also have these standards to avoid potential risks.

This research is a qualitative descriptive study that focuses on the application of good corporate governance principles at KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lamongan Branch as well as obstacles to the application of good corporate governance principles at KSPPS Lamongan Branch by providing information collected through interviews, observation and documentation. A method in which the main communicators are the Head of Branch and the Operations Manager.

The results of this study are by applying the principles of Good Corporate Governance (GCG), KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lamongan Branch applies the principles of Good Corporate Governance (GCG) according to Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Equality and Fairness. However, there is still a principle that has not been fully implemented, namely the principle of accountability. Even though there are limitations or obstacles in implementing GCG, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lamongan Branch experiences internal factors, namely employee discipline in carrying out their duties or responsibilities, and the effort is to apply discipline to employees to be more disciplined and to reward employees with high discipline .

This research can provide advice on the application of the principles of good corporate governance in the KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lamongan Branch to further increase public and prospective members' trust and to further advance and expand the development of the KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lamongan Branch.

Keywords: Principles of Good Corporate Governance, KSPPS, BMT BUS.

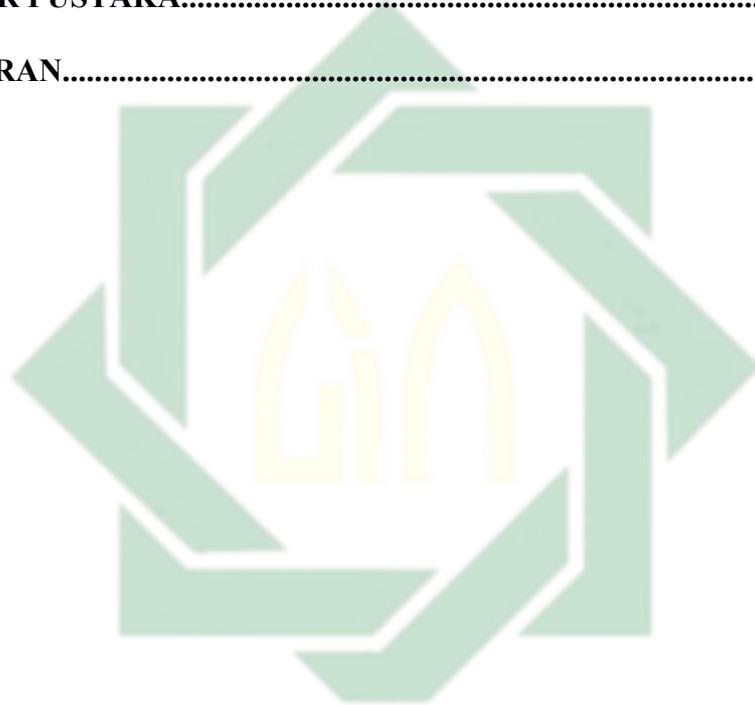
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
DECLARATION.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8

1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 BMT.....	11
2.1.2 Pengertian Good Corporate Governance (GCG).....	15
2.1.3 Tujuan Good Corporate Governance (GCG).....	17
2.1.4 Manfaat Good Corporate Governance (GCG).....	17
2.1.5 Prinsip-Prinsip Implementasi Good Corporate Governance.....	18
2.1.6 Pilar Pendukung Good Corporate Governance.....	21
2.1.7 Unsur-Unsur Good Corporate Governance (GCG).....	22
2.1.8 Tinjauan Atas Implementasi Good Corporate Governance (GCG).....	24
2.1.9 Indikator-Indikator Prinsip-Prinsip Good Corporate Governanc.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	43

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4.1 Observasi.....	44
3.4.2 Wawancara.....	45
3.4.3 Dokumentasi.....	46
3.5 Triangulasi Data	46
3.6.1 Triangulasi Metode	47
3.6.2 Triangulasi Antar Peneliti.....	47
3.6.3 Triangulasi Sumber Data.....	48
3.6.4 Triangulasi Teori	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum KSPPS BMT BUS.....	50
4.1.2 Analisis Penerapan Prinsip Transparansi.....	72
4.1.3 Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas.....	76
4.1.4 Analisis Penerapan Prinsip Responsibilitas.....	91
4.1.5 Analisis Penerapan Prinsip Independensi.....	92
4.1.6 Analisis Penerapan Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran.....	93
4.1.7 Analisis Kendala dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.....	95
4.2 Pembahasan.....	96

BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	113



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Lamongan.....	5
Tabel 2.2 Indikator Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.....	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.4 Data Perkiraan Angsuran Pembiayaan.....	59
Tabel 4.5 Unit Kerja KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.....	66
Tabel 4.6 Jumlah Anggota KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.....	69
Tabel 4.7 Perbandingan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.....	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	44
Gambar 4.2 Visi Misi.....	61
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BMT BUS.....	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi global kian hari semakin tumbuh mendorong perusahaan agar senantiasa mampu memanfaatkan peluang bisnis lokal dan internasional. Menurut Halimatusadiah dan Gunawan (2014), persaingan bisnis dapat dimenangkan dengan membentuk iklim manajemen bisnis yang kompetitif dan terorganisir. Halimatusadiah dan Gunawan (2014) juga menambahkan bahwa seluruh aspek pendukung tersebut patut didukung bagi tatakelola perusahaan yang baik. Salah satunya ialah menggunakan Good Corporate Governance (GCG) sebagai penunjangnya. Serta dengan mengedepankan etika maka visi misi perusahaan dapat dicapai.

GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik sudah memerankan pokok signifikan di Indonesia. Dampak tatakelola yang buruk, sebuah perusahaan atau negara jatuh ke dalam resesi, seperti yang terjadi kala Indonesia mendapatkan kritis finansial saat tahun 1997. Setelah belajar dari pengalaman resesi ini, muncul gagasan bagaimana cara bangkit dari resesi tersebut meningkatkan tata kelola yang baik (Abidin, 2019). Selain itu, Abidin (2019) memaparkan berbagai cara untuk meningkatkan perusahaan, baik swasta maupun publik, dengan

memperkenalkan realisasi tatakelola perusahaan yang baik dalam semua sektor masyarakat. Bank Dunia (2019) memaparkan jika GCG berarti seperangkat undang-undang, kebijakan, pegangan yang harus diikuti demi mendorong sumber daya perusahaan selama beroperasi realistis, menciptakan taksiran perdagangan berkelanjutan peringkat berjarak pada pemangku kontribusi umum setempat menurut segenapnya”. Good Corporate Governance(GCG) diperlukan untuk memajukan pasar yang ekonomis, transparency juga konstan mematuhi hukum dan peraturan.

Dijelaskan selama Kebijakan Bank Indonesia (PBI) pasal 02 ayat (1) No. 11/33/PBI/2009 berkenaan Pengoperasian Good Corporate Governance guna Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa mengimplementasikan Good Corporate Governance wajib diterapkan oleh bank di tiap tindakan upaya atas segenap kedudukan atau janjang lembaga. Dalam tuntutan ini, yang dimaksud dengan GCG yakni praktik pengelolaan bank mengikuti asas (transparansi), (accountability),(responsibility) , profesionalisme, (fairnes). Poin diterbitkannya PBI ialah sebagai penguat konteks perbankan negara seraya menahan resiko yang bertambah canggih. Kinerja dan kepatuhan pada peraturan dapat meningkat dengan diterapkannya GCG di bank. Komisi dalam negeri strategi GCG (2004) mencatat dalam panduan GCG perbankan indonesia, bahwa penerapan GCG penting adanya demi menegakkan anutan publik beserta global merupakan prasyarat otoriter untuk pembangunan bidang perbankan yang berfaedah serta stabil.

Implementasi GCG menjadi salahsatu wujud tanggung terhadap publik jika satu perusahaan didominasi secara efektif, terlatih dan penuh kecermatan.

Pengetahuan mengenai kritis finansial global sempat terbentuk menggerakkan pentingnya kenaikan efisien implementasi tata usaha risiko (GCG). Misinya yakni demi Bank mampu berupaya mengenali persoalan selaku awal, mengadakan tindak lanjut pemulihan yang sinkron serta sigap, dan mempraktikkan (GCG), tata laksana risiko dengan bermanfaat sampai bank semakin tangguh ketika menjelang krisis. (Sa'diah & Buchori, 2017)

Susunan Bank Indonesia [BI] No. 13/1/PBI/2011 yang memuat berkenaan mengharuskan segenap bank umum mengadakan evaluasi mandiri [self assessment] jenjang kesehatan bank memanfaatkan pendekatan risiko [Risk-based Bank Rating/RBBR] dimana memperkirakannya berpegang mencakup Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.13/24/DPNP mencakup aspek profil risiko (Risk Profile), (GCG) , Rentabilitas (Earning), Permodalan (Capital) diringkaskan atas RGEC. (Pratikto dkk, 2019)

GCG merupakan himpunan hukum, tatanan, ataupun undang-undang yang patut dilengkapi supaya mewujudkan kapasitas perusahaan secara positif agar menjadikan poin economic yang kelanjutan selama waktu lama bagi aspek pemangku saham beserta masyarakat. (Mustofa dkk, 2020)

Menurut Effendi (2017 : 18), dasar GCG selaku badan kepercayaan harus mengikuti prinsip keterbukaan dalam kegiatan usahanya (transparansi), mengukur kinerja pada seluruh tingkatan bank secara konsisten dan didasarkan pada penilaian yang sejalan beserta point perusahaan, sasaran usaha beserta pendekatan bank, merepresntasikan akuntability bank (accountability), mengikuti hukum kewaspadaan serta menetapkan ketaatan kepada anggaran dasar yang resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban bank, tidak memihak serta tanpa tuntutan selama mengambil putusan (independensi), selalu mengawasi minat segenap pemangku signifikan sesuai prinsip (fairness). Berdasarkan ketentuan PBI yang mewajibkan implementasi GCG oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, maka BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro juga harus memiliki standar tersebut agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi. Tanpa GCG yang positif, akan sulit bagi badan finansial syariah demi menguatkan posisinya, meluaskan jaringannya, dan menunjukkan kinerjanya yang lebih efektif.

Menurut Hestanto (2020), “Baitul Maal wa Tamwil [BMT] maupun yang lebih dikenal “Koprasi Syariah” adalah lembaga keuangan sharia dengan skala operasi mikro yang misinya menggabungkan dan melangsungkan dana pada para anggotanya”. Selain itu, Hestanto (2020) menyatakan BMT terbagi dua sebutan, yakni “baitul maal” serta baitul tamwil” sebutan kepada badan menghimpun serta melangsungkan dana non profit, sebagaimana sedekah, zaka, infak, sementara Baitul tamwil

sebutan bagi badan yang menghimpun dan melangsungkan dana profitabel, sehingga (BMT) memenuhi kedudukan double yakni peranan social & peranan profitabel.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cab.Lamongan mewujudkan salah satu badan keuangan sharia yang berada di Jalan Sunan Giri No.20 Sukorejo 02/01 Kecamatan Lamongan, Kab Lamongan, Jawa Timur, 62215. pusatnya berada di Jalan Untung Suropati Nomor.16 Kec.Lasem Kab.Rembang Provinsi Jawa Tengah, didirikan pada tanggal 10 Nov 1996. Selama beroperasi, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) mendapatkan setengah kali pergantian AD hingga akhirnya berlandaskan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 1163/PAD/M.KUKM.2/VIII/2019 Tgl 23 08 2019 menyetujui Akta Perubahan AD No.01 Tgl 01 04 2019 dengan Yuniarto Sukaredjo SH., M.Kn. yang berdomisili di Rembang berkenaan, Pergantian struktur pemimpin dan pemeriksa, Perpaduan BMT Bina Ummat Sejahtera [BUS] Jatim ke BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) sebagai dalam negeri.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Sharia BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cab Lamongan dari dulu sampai sekarang masih berdiri kokoh dengan berpegang teguh pada prinsip syariahnya serta selalu mengikuti perkembangan ekonomi dengan berinovasi secara terus menerus. Daya saing kualitas pengelolaan sistem operasi BMT terus meningkat seiring dengan berkembangnya BMT di kalangan masyarakat Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan konvensional dan syariah dirasa

cukup ketat persaingannya, hingga saat itu Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cab Lamongan harus memiliki tata kelola perusahaan yang unggul sebagai modal untuk bersaing dengan sektor perbankan lainnya. Berdasarkan Data Statistik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Terdapat 142 Unit Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Lamongan.

Tentu saja dalam penerapan kaidah GCG bukan perkara yang sepele dan yang pastinya ada hambatan-hambatan yang dituju Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Sharia BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cab.Lamongan. Permasalahan yang biasanya muncul saat praktik pedoman GCG ditinjau pada minimnya pengetahuan karyawan terkait penerapan Good Corporate Governance dan juga adanya rangkap jabatan, sebagai contoh ialah karyawan bagian Marketing merangkap juga sebagai Relationship pembiayaan. Hal ini yang dapat menjadi salah satu hambatan selama mengimplementasikan GCG. Penerapan GCG membentuk factor penetar yang strategic kepada perusahaan untuk terus menaikkan peringkat dan mempertahankan progres berkepanjangan. Dengan begitu, perusahaan harus berkomitmen untuk melanjutkan prinsip GCG supaya dapat memperoleh manfaatnya.

Bersumber pada penjabaran latar belakang diatas, bahwa penulis terikat untuk melangsungkan penelitian menggunakan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tidak percayaan nasabah menjadi masalah utama
2. Buruknya tata kelola perusahaan membuat kegagalan yang berdampak pada memburuknya perekonomian.
3. Pemahaman SDM tentang Good Corporate Governance yang tidak optimal nantinya akan berpengaruh pada bisnis yang tidak optimal juga.
4. Belum terpenuhinya Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Lamongan

1.2.2 Batasan Masalah

Dari identifikasi diatas dibatasi masalah agar penelitian tidak meluas yakni sebagai berikut:

1. Penulis hanya membatasi masalah Penerapan Prinsip Good Corporate Governance(GCG) dengan indikator prinsip tata kelola perusahaan
2. Kendala penerapan Good Corporate Governance(GCG) dengan indikator prinsip tatat kelola perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah yang sudah dijelaskan diatas, hingga permasalahan tersebut mampu dijelaskan seperti berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Good Corporate Governance(GCG) pada KSPPS BUS Cabang Lamongan?
2. Apa saja kendala Penerapan Good Corporate Governance(GCG) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitan ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Penerapan Good Corporate Governance(GCG) pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.
2. Untuk mengidentifikasi Faktor Kendala Good Corporate Governance(GCG) pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.

1.5 Manfaat Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, dapat dirangkum bahwa penelitian ini mempunyai utilitas manfaat teoritis serta manfaat praktis, yakni :

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini bertujuan supaya berkontribusi akan peningkatan keahlian serta keinginan dapat digunakan selaku persepsi menjelang penerapan konsep yang di dapat di perkuliahan dan memajukan kemahiran tentang macam mana program-program nyata diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan

mampu digunakan petunjuk yang bermanfaat saat memajukan kemampuan manager seraya menegakkan penerapan konsep GCG yang tepat.

2. Kepada Peneliti

mengunggah pemahaman serta informasi berdasarkan peneliti terkait penerapan GCG

3. Kepada Institusi Pendidikan

peluang anjuran dapat memajukan kadar institusi sekolah serta perkuliahan terliput tenaga pembimbing didalamnya.

4. Kepada Ilmu Pengetahuan

untuk rujukan selama teknologi pembelajaran yang berkesempatan meraih pemahaman.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 BMT

1. Pengertian BMT

BMT(Baitul Maal Wa Tamwil) ataupun Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan skala mikro menggunakan prinsip sharia sebagai dasar operasinya. Menurut Hestanto (2020), BMT disebut juga pada Koperasi Sharia, sebagai lembaga keuangan syariah berskala mikro bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada anggota mereka. Selanjutnya Hestanto (2020) menyatakan BMT ialah lembaga keuangan syariah dengan skala operasi mikro yang misinya menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya”. Selain itu, Hestanto (2020) menyatakan “baitul mall” serta “baitul tamwil” menjadi dua sebutan yang menyusun BMT, Baitul maal dikhususkan atas penyaluran dana non profit atau tidak mengambil untung (sedekah, infak dan zakat), kemudian Baitul tamwil dikhususkan pada penyaluran dana komersial. Dari kedua istilah tersebut, BMT memiliki dua fungsi yakni sosial dan komersial. Menurut Hestanto (2020), BMT memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, saling menguntungkan, memaksimalkan keuntungan finansial bagi badan serta wilayahnya.
- b. Tidak termasuk lembaga social, melainkan boleh digunakan selama memberikan infak, sedekah, zakat untuk ketentraman padat orang.
- c. Dimunculkan dari rendah ke atas dengan partisipasi masyarakat .
- d. BMT dimiliki oleh masyarakat minim dan menengah kebawah di lingkungannya sendiri, tidak kepunyaan individu lain ataupun diluar masyarakatnya sendiri.

2. Tujuan BMT

Menurut Hestanto (2020), BMT menjadi lembaga keuangan sharia bertujuan sebagai:

- a. Menyatukan serta menyalurkan dana yang menyimpan uang di BMT, kegunaan uang yang berhasil dinaikkan dengan menipkan surplus (memiliki kelebihan dana) dan defisit (kekurangan atau tidak memiliki dana).
- b. Penyusun serta penyedia likuiditas, membuat mesin penunaian yang resmi mampu mencukupi tanggungan badan ataupun individu.
- c. Asal muasal penghasilan, menghasilkan keahlian pekerjaan serta mendatangkan pemasukan bagi pegawai.

- d. Pemberi informasi, menginformasikan tentang risiko, manfaat, dan peluang yang ada.
- e. Pemberi pendanaan guna usaha mikro menengah serta koperasi, BMT seperti badan finansial mikro sharia dengan memiliki keunggulan tiada membebankan jaminan kepada UMKMnya.

3. Peranan BMT

Menurut Sholihah (2020), BMT menyandang sejumlah kontribusi, yakni:

- a. Menghindarkan masyarakat pada pelaksanaan finansial non syariah.

Mengomunikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi syariah, dapat melalui kegiatan pelatihan mengenai bersosial yang syariah, penimbangan yang tidak urang, kejujuran dengan nasabah begitu yang lainnya.

- b. Membina serta membiayai bisnis kecil.

BMT diharuskan untuk beroperasi waktu memenuhi tugasnya selaku lembaga finansial mikro, seperti mendampingi, membina, memberikan penyuluhan dan melakukan pengawasan pada kegiatan usaha dan masyarakat.

c. Menghilangkan kecanduan utang.

Masyarakat yang masih kecanduan pada utang atau rentenir dan pemenuhan keinginan masyarakat menggunakan dana cepat. Jadi BMT patut mengendalikan masyarakat dengan terpuji, seperti yang siap kapan saja, birokrasi yang mudah, serta lainnya.

d. Mendukung keseimbangan economic umum melalui pemerataan kuota.

Tugas BMT yang berhadapan tepat bersama masyarakat yang canggih sangat membutuhkan kecerdasan sikap, dengan begitu perhatian BMT harus tercurahkan kepada prosedur evaluasi saat memetakan skala prioritas. Seperti perihal pendanaan, kelayakan nasabah terkait kelompok nasabah beserta kategori anggaran yang ditawarkan harus diperhatikan oleh BMT.

4. Fungsi BMT

Menurut Hestanto (2020), fungsi BMT bagi masyarakat, memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

- a. Melakukan peningkatan karakteristik SDM partisan, pengelola beserta direksi supaya makin kompeten, (selamat, damai, sejahtera) serta amanah hingga semakin komplit serta

andal untuk berjuang dan berusaha (beribadah) menghadang hadapan global.

- b. Menyusun dan menggabungkan dana sebegitu cara maka sanggup digunakan dengan efektif didalam ataupun diluar badan demi keperluan masyarakat luas.
- c. Memajukan lapangan pekerja, menguatkan serta memajukan kualitas mitra beserta pasar komoditas.

2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance*(GCG)

Forum *For Corporate Governance In Indonesia* [2001] menjelaskan *Good Corporate Governance*(GCG) bagai satuan kebijakan yang memutuskan jalinan pada pemangku kepentingan penyelenggara, bagian penagih, pemerintahan, pegawai, dan stakholder yang internal, eksternal lain kewenangan serta tanggungan mereka. Atas dasar berbeda, sebagai metode yang memandu serta mengarahkan perusahaan. Selaras dengan uraian di atas, Bank Dunia (2019) berpendapat bahwa GCG sebagai sekumpulan UUD, peraturan, kaidah yang mesti disertai demi memajukan ketepatangunaan sumberdaya perusahaan dalam beroperasi, menghasilkan angka economic berkesinambungan waktu lama kepada para pemangku kontribusi serta masyarakat sekeliling secara keseluruhan.

Berdasarkan Sutedi (2011), GCG yaitu satu metode serta pola yang berguna bagi badan perusahaan (pemilik modal atau pemegang saham, komisaris, dewan pengawas dan direksi) demi memajukan kinerja dan akuntabilitas bisnis untuk mencapai nilai pemegang saham selama jangka panjang selalu tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder lainnya, berdasarkan hukum dan etika.

Menurut Tunggal (2013), GCG merupakan suatu sistem pengatur, pengendali dan pemantau proses manajemen bisnis untuk meningkatkan nilai saham, serta kepedulian terhadap stakeholders, pegawai dan masyarakat sekitar.

Menurut (M. I. S. dan G. A. S. Pratikto, 2019) Good Corporate Governance yaitu penaksiran mutu terhadap manajemen bank yang sinkron bersama prinsip Good Corporate Governance. Inti penaksiran berpegangan atas ketentuan Bank Indonesia perihal praktik GCG pada bank umum dengan mengawasi kompleks dan individualitas upaya bank. Prinsip diantaranya Accountability, Responsibility, Fairness, Transparency, Independency. (Aini, 2021)

Menurut Agoes (2011), GCG sebagai sistem pengatur jalinan antara karakter komisaris bersama direksi, pemangku saham serta pihak yang berkepentingan lain. GCG dapat pula diartikan sebagai proses transparan di mana tujuan perusahaan ditentukan, dicapai, dan evaluasi efektivitasnya.

Beberapa uraian definisi GCG dari para ahli diatas, maka ditarik ketetapan apa yang diartikan atas GCG yakni sebagai suatu mekanisme pengarah, pengendali, dan pengatur tatakelola perusahaan untuk mencapai proporsi, ketahanan, kewibawaan perusahaan untuk membagikan tambahan angka perusahaan berdasarkan ketentuan hukum dalam jangka panjang yang berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan *Good Corporate Governance*(GCG)

Berdasarkan Riadi (2019) GCG menjadi langkah penting untuk menciptakan harapan pasar serta memajukan kapitalisasi global yang lebih konstan serta berjangka lama. Tujuan penerapan (GCG)diantaranya yaitu:

1. Menghasilkan angka tambahan kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Memastikan tujuan yang ditetapkan sudah tercapai.
3. Memastikan bahwa aktiva milik perusahaan terjaga dan dalam keadaan baik.
4. Menentukan bahwa perusahaan memiliki pelaksanaan bisnis secara baik
5. Meyakinkan bahwa operasi perusahaan terbuka.

2.1.4 Manfaat *Good Corporate Governance*(GCG)

Forum for Corporate Governance in Indonesia(FCGI)

meyebutkan sebagian manfaat dari penerapan GCG berikut:

1. Memajukan kapasitas perusahaan dengan cara memperbaiki metode pengutipan ketetapan, efisiensi operasional perusahaan dan layanan pemangku kepentingan.
2. Memudahkan akses pendanaan yang bertambah ekonomis serta tidak tegang (akibat factor kepercayaan), dengan begitu nilai perusahaan akan meningkat.
3. Menumbuhkan kembali kepercayaan investor buat berinvestasi diindonesia.
4. Pemangku saham senang dengan hasil kerja perusahaan lantaran stakeholder nilai serta deviden juga meningkat.

2.1.5 Prinsip-prinsip Implementasi *GCG*

Pada umumnya terkandung lima prinsip dasar GCG menurut Kaihatu (2006), yakni:

1. Transparency (Keterbukaan informasi)

Pada firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat:70 menjelaskan bahwa sebagai berikut:

سَدِيدًا قَوْلًا وَقُولُوا لِلَّهِ اٰمَنًا الَّذِيْنَ يٰئِيْهَا

Artinya : "Wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kalimah yang benar"

Tranparancy yakni terbuka ketika mengambil suatu putusan serta keterbukaan saat penyampaian keterangan materiil serta real terkait perusahaan.

2. Accountability(Akuntabilitas)

Adapun firman Allah yang mengenai akuntabilitas terdapat pada penggalan al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat282

فَ مَسْمَىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أُمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 كَا يَكْتُوبَ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ كُتُبُهُمْ هُوَ لِيَكْتُوبَ
 وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمْلَلِ فَلِيَكْتُوبَ اللَّهُ عِلْمَهُ
 أَوْ لَا أَوْضَعِيْفَ سَفِيْهَا الْحَقُّ عَلَيْهَا الَّذِي كَانَا فَإِنْ شَيْبَا مِنْهُ يَبْخَسُ
 بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلِيَمْلَلِ هُوَ يَمْلَأَ أَنْ يَسْتَطِيْعُ

Artinya : "Wahai orang-orang beriman, manakala kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam batas yang ditetapkan, hendaklah kamu mencatatnya. Serta hendaklah seorang penulis di antara kamu mencatatnya dengan sesuai. Dan janganlah penulis segan mencatatkannya sebagaimana Allah menuntun, lalu hendaklah ia menulis, hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan [apa yang segera ditulis itu], hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, janganlah ia menurunkan sedikitpun daripada hutangnya. Sekiranya yang berhutang orang yang rapuh akal nya atau rapuh keadannya ataupun dia sendiri tidak mampu mengimlakan, lalu hendaknya walinya mengimlakan dengan jujur”

Accountability berarti kejelasan peranan, struktur, metode, dan tanggungan lembaga perusahaan sehingga penyelenggaraan perusahaan berjalan secara berhasil.

3. Responsibility(tanggungjawab)

Responsibility adalah perusahaan dikelola sinkron dengan prinsip bisnis yang sehat dan aturan perundang-undangan yang valid.

4. Independency(Kemandirian)

Independency yaitu kondisi di mana mengelola perusahaan dengan kompeten, bebas dari hantaman relevansi serta dampak ataupun tuntutan berdasarkan aspek manajemen yang tak selaras melalui aturan UUD serta prinsip bisnis yang sehat berlaku.

5. Fairness (Kesetaraan dan kewajaran)

Kesetaraan dan kewajaran adalah perlakuan setara dan adil selama mewujudkan hak-hak stakeholders berlandaskan kesepakatan dan aturan UUD yang resmi.

Sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009 berkenaan Pelaksanaan GCG oleh Bank Umum Shariah dan Unit Usaha Shariah, prinsip GCG yakni:

1. Transparency (Keterbukaan)
2. Accountability (Akuntabilitas)
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
4. Professional (Profesional)
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

2.1.6 Pilar Pendukung *Good Corporate Governance* (GCG)

Zarkasyi (2019 : 36) menjelaskan jika GCG bermanfaat demi memajukan pasar yang ekonomis, transparan, konstan melalui peraturan UUD. Selanjutnya Zarkasyi (2019 : 36) menambahkan juga bahwa terdapat tiga pilar pendukung penerapan GCG yang saling berkaitan, (1) negara serta unit sebagai regulator, (2) bidang usaha sebagai pelaksana usaha, (3) masyarakat konsumen barang beserta jasa bidang usaha. Zarkasyi (2019 : 36) melanjutkan dengan menjelaskan prinsip utama yang wajib dilakukan setiap pilar yakni:

1. Negara serta unitnya, peraturan UUD yang mendukung terciptanya lingkungan usaha yang positif, ekonomis, terbuka dengan senantiasa mengikuti aturan UUD.
2. Bidang usaha bagaikan penyelenggara pasar mengimplementasikan GCG menjadi acuan utama saat menjalankan bisnis.
3. Masyarakat sebagai konsumen komoditas serta pelayanan komersial dan bagian yang tertimpa akibat saham perusahaan, menunjukkan uji tuntas dan pemeriksaan secara objektif dan bertanggung jawab.

2.1.7 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*(GCG)

Unsur-unsur GCG berdasarkan Tunggal (2013:184) yaitu:

1. Pemangku Saham

Pribadi atau lembaga yang berkepentingan signifikan terhadap perusahaan. GCG sangat diperlukan demi menjamin hak-hak pemangku saham seperti menjaga properti, melakukan transfer saham, memberikan keterangan yang selaras serta menerima surplus terkait perusahaan.

2. Komisaris dan pimpinan

Unsur yang memiliki tanggung jawab dalam penetapan tujuan perusahaan, melakukan pengembangan kebijakan, dan membentuk tim manajemen puncak agar tujuannya tercapai.

Mereka juga wajib menilai apakah keadaan perusahaan sudah sesuai dengan pedoman yang disepakati.

3. Komite Audit

Komite audit bertugas untuk menyampaikan argument atau rekomen terhadap lembaga komisaris berkenaan status sistem tatakelola perusahaan yang diterapkan kepada manajemen perusahaan.

4. Sekertaris Perusahaan

Sekertaris menjadi jembatan media dengan keperluan perusahaan beserta aspek ekstern untuk mendukung pemahaman umum terhadap konsep perusahaan serta memenuhi tanggungan perusahaan. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab pada pimpinan.

5. Manajer

Manajer berperan sangat penting ketika oprasional perusahaan. Sebab, manajer wajib berpengetahuan merata perihal masalah sistem perusahaan.

6. Auditor Ekstern (Independent)

Auditor eksternal bertanggungjawab dalam meninjau paparan finansial perusahaan. paparan auditor ekstern

membentuk pendapat kompeten atas paparan finansial perusahaan.

7. Auditor Intern

Auditor Intern bertanggung jawab dalam merekomendasikan atau menasehati pihak otoritas tentang situasi di perusahaan.

2.1.8 Tinjauan Atas Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pedoman Praktis penerapan *GCG*

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004), penerapan *Good Corporate Governance* harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Oleh karena itu, di bawah ini dijelaskan pedoman realistik berhasil digunakan terhadap bank sebagai pedoman ketika penerapan *gcg*.

a. Penerapan *good corporate governance* mampu dilaksanakan melewati lima langkah, yakni:

1. Penentuan visi misi serta nilai-nilai perusahaan
2. Pembentukan struktur tatakelola perusahaan
3. Penjadian budaya perusahaan
4. Penentuan media pengungkapan publik
5. Penyelesaian beragam prosedur bank sehingga melengkapi prinsip Tatakelola Perusahaan.

b. Menentukan visi misi serta nilai-nilai perusahaan membentuk tahap permulaan yang patut dilakukan bank untuk menerapkan Tatakelola Perusahaan.

c. Struktur Tatakelola Perusahaan selaku perlahan dibangun serta sekurang-kurangnya berikut:

- 1) Prinsip GCG, selain visi misi bank, dapat mengisi keputusan akan menerapkan GCG serta petunjuk penting pelaksanaan prinsip GCG yakni transparan, akuntability, tanggung jawab, independent, keadilan atau kewajaran.
- 2) Kode Etik yang mencantumkan petunjuk-petunjuk dengan tepat dan terpercaya bagi kinerja pengurus dan pegawai bank.
- 3) Tata Tertib kegiatan Dewan Komisaris dan Tata Tertib kegiatan pimpinan yang mengatur kewenangan dan tanggungan dari Dewan Komisaris serta pimpinan ataupun para komponennya, beserta tanggung jawabnya.
- 4) Lembaga yang mencerminkan manajemen resiko, pengendalian intern, loyalitas.
- 5) Strategi manajemen resiko, audit loyalitas.
- 6) Strategi personalia secara benar, terbuka.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- 7) Konsep bisnis yang memberikan gambaran petunjuk masa lama yang benar.
- d. Penciptaan adat perusahaan akan memfasilitasi tercapainya visi misi beserta penerapan Good Corporate Governance. Adat perusahaan diciptakan melewati pemutusan prinsip inti (guiding principles), poin-poin (values), norma-norma yang disetujui dan diimplementasikan menggunakan contoh-contoh spesifik dari manajer bank. Budaya perusahaan harus terus didiskusikan dan didukung oleh komunikasi sosial.
- e. Penetapan model dan sarana disclosure dibutuhkan sebagai bagian dari tanggung jawab bank kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan sarana bisa berupa perincian tahunan, website, tinjauan implementasi GCG dan media lain.

2. Tahap-Tahap Pelaksanaan GCG

Berdasarkan Kaihatu (2006), dalam menerapkan GCG di perusahaan, pihak perusahaan haruslah cermat dalam mengambil langkah berdasarkan analisis lingkungan dan tahap ketersediaan, jadi penerapan gcg yang baik bisa melangkah bijak lalu didukung oleh segenap bagian perusahaan. Selanjutnya kaihatu (2006) menambahkan pula bahwa perusahaan yang sukses

mempraktikan gcg pada umumnya memerlukan langkah-langkah selanjutnya (Chinn, 2000; Shaw, 2003).

a. Jenjang Persiapan

Tiga langkah utama tahap persiapan adalah:

- 1) Awareness Building, peningkatan kesadaran akan pentingnya GCG serta keterikatan seiring saat implementasinya. Mampu dibantu oleh ahli dari perusahaan asing(luar). Kegiatannya mampu berbentuk seminar, workshop, dan perbincangan grub.
- 2) Good Corporate Governance Assessment, mencerminkan keadaan perusahaan pada saat menentukan gcg detik ini. Aksi ini diperlukan untuk meyakinkan poin pertama tingkat penerapan GCG dan mendapatkan identifikasi prosedur dengan benar untuk menyiapkan prasarana serta susunan perusahaan akan memfasilitasi implementasi GCG secara benar. Melalui istilah berbeda, penilaian GCG diperlukan akan menentukan perspektif mana yang harus diperhatikan didahulukan serta tahap segala sesuatu yang berhasil dilakukan demi mencapai hal tersebut.
- 3) Tatakelola perusahaan yang baik Manual Building, mewujudkan tahap selanjutnya sesudah menyelesaikan

Penilaian tatakelola perusahaan yang baik. Berlandaskan produk pemetaan jenjang persiapan badan dan pengenalan preferensi penerapan, hingga bisa dihasilkan pedoman atau arahan penerapan Good Corporate Governance. Persediaan manual berhasil dilakukan menggunakan kontribusi kompeten eksternal independent. kompeten ini patut dibedakan dengan kompeten institusi perusahaan dan kompeten yang ditujukan kepada seluruh badan perusahaan, yang mencakup berbagai segi sebagaimana:

- a) Prosedur GCG perusahaan
- b) Panduan GCG kepada organ perusahaan
- c) Dasar Perilaku
- d) Piagam komite audit
- e) Strategi terbuka dan disclosure
- f) Prosedur dan konteks manajemen risiko
- g) Penerapan roadmap

b. Jenjang Penerapan

Jika perusahaan telah menyangandang good corporate governance manual, dilanjutkan dengan sejak menerapkannya di perusahaan. 3 tahap pokok dalam tahap implementasi yakni:

- 1) Pemasyarakatan, dibutuhkan untuk menginformasikan aspek-aspek yang bersangkutan bersama penerapan good corporate governance kepada seluruh perusahaan, utamanya perihal panduan penerapan good corporate governance. Dalam kegiatan pemasyarakatan (sosialisasi) harus dibentuknya kelompok tersendiri di bawah pengendalian manajer utama dan yang lain selaku juara tatakelola perusahaan yang baik di perusahaan untuk melaksanakan sosialisasi.
- 2) Implementasi, yaitu operasional yang dijalankan berdasarkan roadmap yang disusun sesuai dengan pedoman Good Corporate Governance, saat melakukan implementasi, dewan komisaris dan direksi perusahaan dilibatkan di dalamnya, sehingga implementasi bersifat top down approach. Implementasi juga harus mencakup juga usaha manajemen transformasi (manajemen perubahan) untuk memantau transformasi yang dihasilkan dari penerapan good corporate governance.
- 3) Internalisasi, adalah implementasi berjenjang. internalisasi meliputi usaha pengenalan GCG selama setiap kegiatan usaha serta serangkaian aturan perusahaan. Usaha tersebut mampu dinyatakan bahwa implementasi GCG tidak hanya bersifat superficial atau

kepatuhan yang dangkal saja, melainkan benar-benar tercermin dalam operasional perusahaan secara keseluruhan.

c. Jenjang evaluasi

Jenjang evaluasi menggambarkan bagian yang pantas dilaksanakan menurut berkala dari tenggat waktu menjelang memperkirakan sejauh mana keaktifan implemetasi GCG beserta mengharuskan aspek independent menyelenggarakan penerapan audit beserta scoring terhadap pelaksanaan GCG yang tertera. Ada banyaknya konsultan perusahaan yang menyediakan bantuan audit tersebut, ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menawarkan bantuan scoring. Bisa juga menjadi wajib berupa evaluasi, review atau scoring, misalnya dilakukan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian bisa mengakomodasi perusahaan memetakan ulang keadaan serta konteks dan perolehan perusahaan ketika menerapkan GCG maka mampu memperbaiki atas dasar rekomen yang disampaikan.

2.1.9 Indikator-Indikator Prinsip-Prinsip GCG

Menurut Zarkasyi (2019 : 38), Tiap perusahaan wajib meyakinkan jika prinsip Good Corporate Governance disusun atas perspektif bisnis serta keseluruhan rangkain perusahaan. Prinsip

Good Corporate Governance adalah transparansi, akuntability, responsibility, independen, fairness yang dibutuhkan demi menggapai kapasitas yang berkelanjutan demi selalu mengawasi stakeholder. Berikut indikator prinsip GCG:

Tabel 2.2 Indikator Prinsip-Prinsip GCG

No	Perspektif yang di nilai	Keterangan
01.	Transparency	Kemudahan Mengakses Informasi Ketersediaan Informasi Kerahasiaan Informasi Penyampaian Kebijakan Visi Misi Perusahaan
02.	Acountability	Perincian tugas dan tanggungjawab Kompetensi yang sesuai Sistem Pengendalian Internal Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Tugas sesuai Pedoman

03.	Responsibilitas	Kepatuhan hukum Tanggung jawab sosial Prinsip kehati – hatian
04.	Independency	Dominasi dan Pengaruh
05.	Fairness	Kesempatan Berpendapat Kesempatan Kompensasi Kesempatan Karyawan

Sumber : Moh. Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2019).

Secara fungsional, organisasi berkewajiban memberikan nilai tambah kepada masyarakat berupa kesejahteraan sosial. Penerapan indikator Good Corporate Governance secara strategis mempromosikan efisiensi lembaga, menghasilkan kemampuan yang baik dan begitu efisien dalam mencegah kemungkinan penyimpangan, yang menuju atas usaha perolehan profit yang sepadan. Untuk itu, suatu lembaga mampu mengimplementasikan indeks Good Corporae Governance untuk mencapai tujuan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sumber awal hasil penelitian berguna bagi peneliti dengan mencoba mencocokkannya bersama penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian pendahuluan pun bisa dimaknai menjadi asal mula ide serta turut mendukung kelancaran pelaksanaan peneliti.

Berikut ini segenap penelitian terdahulu yang dilakukan bersama peneliti lainnya terkait analisis implementasi GCG:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
01.	Dwi Septiyan (2015) “Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Mandiri “	Metode Kualitatif Dengan Analisis Deskriptif	Penerapan gcg pada PT BSM cabang Surabaya sejalan bersama prinsip PT BSM Pusat, pedoman dan kebijakan kode etik. Dengan begitu harus dapat dijaga dan meningkatkannya lagi. Dapat dikatakan juga bahwa prinsip GCG yang diterapkan sudah baik. Jika penerapan lima prinsip GCG dapat menanggung kebebasan dan kewajiban para bagian, pemangku kepentingan dan masyarakat, yakni: prinsip transparansi disusun pada transparency data pemangku kepentingan, penyusunan dan transparansi pada perincian financial, dan transparency penyediaan keterangan produk kepada nasabah dan transparency manajemen risiko.

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
02.	Nur Yuliasari (2017) “Implementasi Good Corporate Governance Di BMT Tumang”	Metode Kualitatif Dengan Analisis Deskriptif	Prinsip dasar GCG pada BMT Tumang sudah berjalan dengan baik, dalam beroperasi sudah selaras dengan standar dan nilai-nilai Islam, terjadi penurunan jumlah kredit macet, sedangkan jumlah aset dan anggota terjadi peningkatan.
03.	Rizqi Agung Pristya Hermawan (2018) “Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) di BMT Muamalat Sejahtera di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam”	Metode Kualitatif Dengan Analisis Deskriptif	Penerapan GCG di BMT Muamalat Sejahtera Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono pada Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya sesuai pada kondisi economic syariah karena masih terdapat perbedaan penerimaan tenaga kerja pada saat calon tenaga kerja adalah satu dari kelompok kepentingan yang cukup berpengaruh di BMT, bisa dipastikan bahwa tanpa diseleksi terlebih dahulu, calon pegawai dapat langsung diterima. Hal ini tentu melenceng dari prinsip keadilan.
04.	Zainal Abidin (2019) “Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah	Metode Kualitatif Dengan Analisis Deskriptif	Persepsi Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Lembaga Keuangan Sharia (LKI) berbeda dengan Good Corporate Governance yang diterapkan pada badan financial konvensional yang tersedia. Perbedaannya ada pada banyak hal, kira-kira yaitu perihal institusi, Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum badan financial syariah, muamalah didasarkan pada syariat Islam yaitu terhindar dari riba, maisir, dan gharar semua transaksi. Pada Implementasi manajemen koperasi syariah yang baik di PT. BPRS Hikmah Wawaah ialah

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
	Banda Aceh “		perihal keterbukaannya (transparansi), kepercayaan dan mekanisme penjaminan syariah bagi BPRS Hikmah Wawaah untuk menjangkau masyarakat dan pemangku kepentingan.
05.	Elly Ermawati (2019) “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah”	Analisis Deskriptif Kualitatif	penelitian membuktikan jika (GCG) telah diterapkan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah sesuai dengan prinsip transparency, tanggung jawab, profesionalisme, akuntabilitas keadilan. Pada saat yang sama, beliau tidak secara optimal menerapkan indikator dari masing-masing prinsip GCG, yaitu. prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memperkenalkan unsur Siddiq, yang merupakan prinsip syariah yang mendukung penerapan gcg, dalam kerja lembaga. dari GCG. sistem syariah yang diterapkan secara benar dan profesional.
06.	Tesis Erick Saptapratama “Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance [GCG] pada PT. BRISyariah Cab.Bengkulu 2021”	Analisis Deskriptif Kualitatif	telah mempraktikkan dasar tatakelola dalam operasionalnya. Meski mendapatkan kendala penerapan prinsip BRISyariah Cab. Bengkulu dibangun berdasarkan tranparansi dan akuntabilitas, dimana pemegang saham mayoritas mengendalikan perusahaan dengan menentukan kemana arah perusahaan dalam membuat kebijakan guna mengelola kinerja perusahaan. Kejadian tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan terhadap aspek adanya. Tatakelola serta manajer serta karyawan tiada mengadopsinya, meskipun mereka sudah berupaya dengan membuat aturan perusahaan dan

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
			sosialisasi prinsip-prinsip GCG
07.	Jurnal Manajemen Islamic Asia AJIM, Agung Budi Sulistiyo. Judul "Effect of Islamic corporate governance on customer trust: empirical study on islam bank, 2020	Metode Kuantitatif	terdapat dampak dasar gcg serta Kepatuhan Sharia yang berdampak positif kepada kepercayaan nasabah dalam menggunakan SPSS yang diukur dengan transparansi signifikan sebesar 0,047 dan skor signifikan kepatuhan Syariah sebanyak 0,00. Transparansi berdampak keyakinan konsumen lantaran banksyariah mandiri sudah menyediakan pelajaran serta penjelasan relevan dan gampang dijalankan, dimengerti kepada konsumen serta stakeholder, selanjutnya sharia compliance terpengaruh karena Banksyariah Mandiri sudah mempraktikkan dasar dasar syariah dalam operasionalnya tuntunan yang valid. Maka kejadian tersebut mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap perbankan mudah diakui untuk mengawasi pembiayaan. Sedangkan pada akutabilitas, independen, fairness tak berpengaruh penting pada keyakinan konsumen.
08.	jurnal Economic islamic karya setiawan bin lahuri serta vina fitriana wibisono berjudul "Analisis of Implement the GCG Bank BNI Sharia Branch Tasikmalaya" 2020	Analisis Deskriptif Kualitatif	Bank BNI Sharia Cab. Tasik sudah melakukan dasar GCG pada perspektif Islamic. Dalam mempengaruhi hal kemampuan industri agar berkembang serta menguntungkan pada waktu panjang dan kemampuannya untuk mengurangi persaingan bisnis global. Dalam praktiknya, transparansi yang diterapkan bank ini bertolak belakang dengan hasil reward dalam menjalankan operasionalnya. Hasil tanggung jawab adalah

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
			kebijakan atau pedoman yang berlaku untuk setiap badan, yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab departemen serta dapat melaksanakan visi misi, dan rencana industri. penjabaran tanggung jawab industri sering berperan sesuai atas dasar kewaspadaan serta sesuai dengan ajaran yang terjadi.
09.	Jurnal Riset Putri Indar Dewi "Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lembaga bank syariah" 2020	Metode Kepustakaan	Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan benar merupakan bagian pasarekonomic dan terkait kuat bersama membangun harapan efektif perusahaan dengan menerapkannya ataupun lingkungan bisnis negara. Pengenalan sistem tatakelola dapat mendukung terwujudnya kompetisi dengan positif serta lingkungan bisnis mendukung. Islam Corporat Governance merupakan tatanan hukum Syariah digunakan untuk mempertimbangkan dampak kebijakan dan praktik Syariah pada operasi bisnis. Pengukuran kinerja perusahaan bertujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan adanya kegiatan operasionalnya supaya bisa berkompetisi dengan industri lainnya. Penaksiran kemampuan perbankan begitu berguna bagi seluruh pemangku kepentingan perbankan, peningkatan angka saham serta total keuangan seluruh bagian menjadikan indikasi yang meningkatnya kepercayaan kepada masyarakat terhadap bank ini.

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
10.	Jurnal Masalah sama Dessy lailany serta isfan dayan berjudul “analysis penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik pada BRISyariah Puser” 2018	Analisis Deskriptif Kualitatif	<p>bahwa Bank BRISyariah telah menerapkan ada lima dasar tatakelola perusahaan secara efisien. a.dasar transparansi dalam mencapai keterangan pada pemangku hal kepentingan, transparansi ketika manajemen risiko serta transparansi saat berkembangnya media berita technology serta metode laporan manajemen. b.Tanggung jawab telah ditetapkan peran, hak, tugas serta kekuasaan dan serta penanggungjawab dalam jajaran pemangku saham, Badan komisaris, pimpinan, DPS dan bawahannya, pemisahan antara penulis, serta peninjau dan penandatanganan pada bagian penyetujuan dan mengawasi kedamaian pada pegawainya. tercermin atas pencapaian dan punishment oleh karyawan yang tidak mengikuti aturan.</p> <p>c. Akuntabilitas ditunjukkan atas tanggungjawab di perusahaan, yakni kepatuhan pada UUD kebijakan yang ditetapkan oleh negara selaku pemegang otoritas hukum formal di negara tersebut.</p> <p>d. Menunjukkan keahlian dalam membuat keputusan keuangan dan menerapkan dasar ketelitian</p> <p>e. kebiasaan ditunjukkan untuk menghormati pada kewenangan pemangku kepentingan (agent, pemangku saham, konsumen serta bagian lainnya) dengan memberikan laporan secara memadai pada konsumen atas pembagian keuntungan dari perolehan perbankan. Hambatan penerapan Prinsip-prinsip GCG adalah unit kerja kepatuhan yang</p>

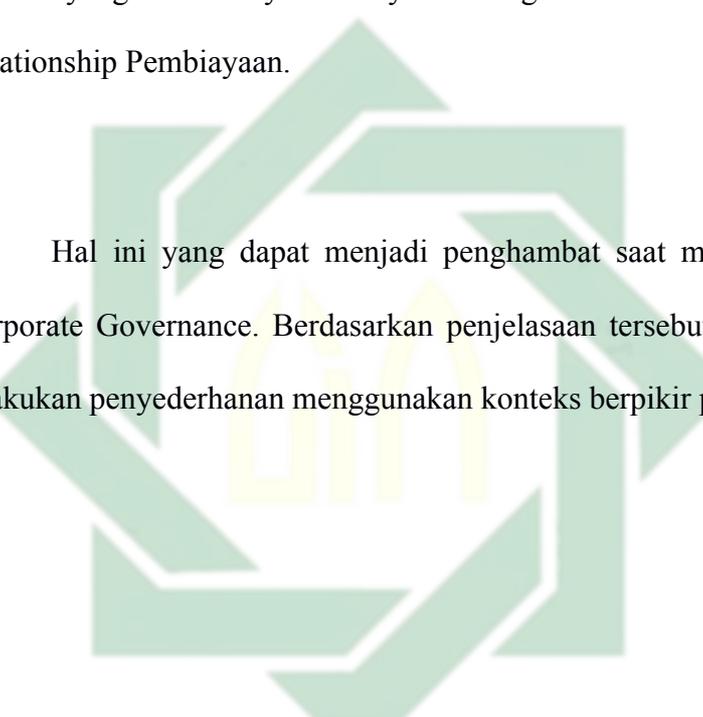
No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
			kurang, kurangnya kesadaran individu, asumsi penipuan, persyaratan promosi bisnis yang memungkinkan pihak luar untuk menggunakan beberapa metode menyimpang, serta persyaratan peraturan terkait dengan due diligence dan kepatuhan (Test dan Approval Test). Hambatan yang muncul diatasi dengan pemantauan kegiatan sosial, melakukan uji coba acak, penyederhanaan pengawasan, menetapkan aturan sanksi bagi ketidakpatuhan, mempercepat proses dengan penunjukan dan memenuhi suatu syarat uji keterampilan bagi direksi dan komisaris baru

2.3 Kerangka Konseptual

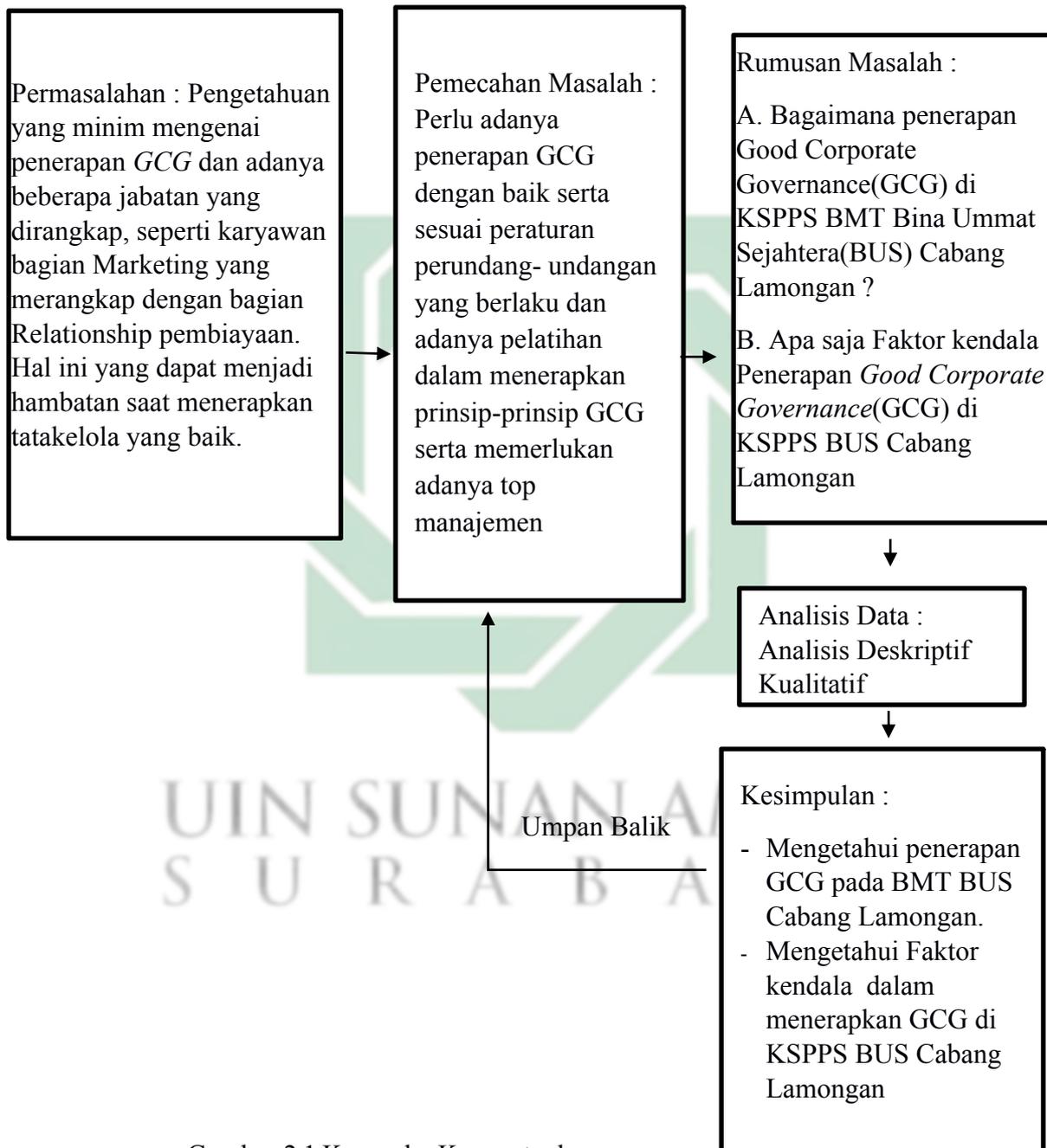
Peningkatan kinerja suatu perusahaan dan nilai ekonomi perusahaan dapat dilihat dari pengendalian dan pengelolaan manajemen yang baik. Perkembangan lembaga financial bank baik itu konven ataupun lembaga financial sharia saat ini sangatlah pesat. Kehadiran lembaga financial tertera sesuai BMT maupun lainnya, dinilai cukup kompetitif. Dengan demikian agar dapat memenangkan persaingan bisnis maka prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik harus diterapkan sesuai yang sudah dibahas pada keputusan pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai praktik GCG kepada Bank Umum Sharia dan Unit Usaha Sharia. Dalam menerapkan GCG tak segampang yang

dipikirkan yang pastinya akan ada kendala-kendala yang dihadapinya. Permasalahan penerapan prinsip Good Corporate Governance bisa dilihat saat pengetahuan karyawan yang kurang mengetahui penerapan Good Corporate Governance serta ditemukannya rangkap jabatan. Rangkap jabatan yang ditemui yaitu karyawan bagian Marketing juga menjadi Relationship Pembiayaan.

Hal ini yang dapat menjadi penghambat saat menerapkan Good Corporate Governance. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa mampu dilakukan penyederhanan menggunakan konteks berpikir penelitian ini:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif bersama pendekatan penelitian lapangan di mana peneliti langsung terjun di lapangan. Menyelidiki topik penerapan tatakelola perusahaan yang baik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan dan kendala penerapan tatakelola perusahaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan. (Sugiyono, 2013)

Metode peneliti ini kualitatif adalah metode penelitian dengan berfokus di pemahaman informasi yang ditemui di lingkungan, dibuat dalam keadaan wajar, berdasarkan kebenaran yang didapatkan di lapangan, setelah itu dibangun sebagai hipotesis serta teori. Metode kualitatif menyediakan data informasi yang terperinci dan bermakna. (Sugiyono, 2013)

Penelitian tersebut berguna dalam mendefinisikan hubungan sosial, memajukan konsep serta menentukan keakuratan data. Peneliti tersebut menjadikan penelitian di lapangan yang mempunyai karakteristik yang dapat dimanfaatkan untuk analysis content. (bin Lahuri & Vina Fitria W, 2020) Tinjauan deskriptif gabungan peneliti yang mendeskripsikan tempat, temuan khusus, memanfaatkan lembaga khusus, perspektif, karakter

khusus, mencoba menciptakan penilaian serta memeriksa interaksi beberapa orang. (bin Lahuri & Vina Fitria W, 2020)

Sebaliknya, pada penelitian tersebut memanfaatkan pendekatan sosiologis, yakni penelitian yang menyaksikan kejadian social, strategi serta kebiasaan dalam menguasai ketentuan yang berada di masyarakat. (Soehartono, 2014).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan di Jalan Sunan Giri No.20, Sukorejo 02/01 Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62215. Lokasi ini dipilih lantaran dekat dengan tempat tinggal peneliti dan peneliti ingin mengetahui apakah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan telah menerapkan Good Corporate Governance(GCG) yang sesuai perbankan sharia. Teknik yang ditargetkan adalah sistem pengambilan sampel atas pandangan khusus. Pilihan tersebut dipastikan oleh seberapa jauh seseorang mengerti persoalan yang diteliti seperti yang disimpulkan pada perkara penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Bagian ini menjelaskan tipe data dan sumber data. Deskripsi ini meliputi segala sesuatu laporan harus didapat, siapa yang harus menjadi bukti pemeriksa, macam mana laporan tertera segera ditinjau serta disimpan untuk memastikan keakuratannya. Subyek penelitian adalah

orang-orang yang berpartisipasi pada penelitian, mengumpulkan laporan data individu demi menanggapi persoalan penelitian. Subjek penelitian sering disebut sebagai topik manusia, peserta peneliti, atau sukarelawan penelitian. (Moleong, 2010)

Metode untuk mempelajari sumber data dari sudut pandang khusus, diperkirakan bahwa individu yang sangat mengerti segalanya yang ingin diketahui peneliti, orang yang memiliki pedoman yang memudahkan peneliti mempelajari topik atau situasi sosial yang diteliti. Diharapkan penerapan teknik yang tepat ini dapat memahami penerapan prinsip-prinsip GCG di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.

3.3.1 Data Primer : didapatkan dari hasil wawancara langsung melalui Kepala Cabang dan Manajer Operasional di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.

3.3.2 Data Sekunder : didapatkan dari sumber lain seperti penelitian terdahulu, artikel maupun jurnal, laporan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) serta situs internet yang berhubungan dengan prinsip good corporate governance.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara ketika pengumpulan data. Deskripsinya adalah :

3.4.1 Observasi

Pengamatan dilakukan dengan terjun serta mengunjungi langsung dilapangan dan di lokasi yang dihasilkan obyek peneliti. Pengamatan ialah alur dari segala bidang pemahaman. (Sugiyono, 2013) Informasi yang diperoleh melalui observasi berupa fakta atau fakta dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk para ilmuwan, sebagai dasar atau dasar dalam bekerja. Pengamatan (observation) dilakukan dengan saksama dan terstruktur dengan fakta yang berlangsung, menggambarkan segala sesuatu yang ditemukan. Yakni, informasi didapat lewat observasi.

1. Lokasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.
2. Profil situasi terkini KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan
3. Pemantauan Penerapan Prinsip GCG di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dianggap sebagai jembatan yang cocok untuk mengetahui secara pasti informasi apa yang ingin kita ketahui. Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti hendak memahami

secara saksama tentang peserta saat menginterpretasikan keadaan serta perihal yang berlaku. (Sugiyono, 2013)

Peneliti memakai wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyediakan pertanyaan serta menentukan responden untuk menjawab, berikutnya dilaksanakan wawancara. Wawancara dilaksanakan beserta keadaan rileks dan tenang, menjauhi menyela percakapan, memerankan pendengar yang terpuji sekaligus efektif tetapi tetap santun. (Moleong, 2010)

Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan adalah kepala cabang. Saat menjalankan wawancara, peneliti bertanya sebagian pertanyaan terkait penerapan good corporate governance. Selain wawancara dengan BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan, peneliti juga melakukan wawancara bersama nasabah.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi melewati rekaman kejadian berbentuk teks arsip, data gambar serta informasi lain yang dimiliki oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan. Metode ini dilakukan peneliti demi memenuhi data-data yang lain untuk mendukung analisis penerapan Good Corporate Governance pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan.

3.5 Triangulasi Data

Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono merupakan “The aim is not to discover the truth about the same social phenomena, but the purpose of triangulation is to improve our understanding of what is being studied.” artinya: “Tujuan triangulasi bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta.” (Sugiyono, 2013). Menurut Norman K. Denzin, Triangulasi itu mencakup empat perihal :Triangulasi metode, triangulasi antarpeleliti (bila penelitian dilaksanakan bersama grup), triangulasi sumber data, triangulasi teori (Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2009)

3.6.1 Triangulasi Metode

Jenis triangulasi memungkinkan peneliti untuk membandingkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berlainan. Misalnya membandingkan hasil survei bersama hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara bersama hasil observasi, atau membandingkan hasil observasi bersama hasil dokumentasi. Peneliti mampu memakai sumber yang beda dengan metode sebelumnya. Triangulasi ini diperankan ketika informasi yang diterima sebelumnya atau informasi tidak jitu.

3.6.2 Triangulasi Antar Peneliti

Triangulasi bermanfaat bahwa lebih dari satu peneliti digunakan. Kejadian tersebut lantaran setiap peneliti memiliki karakter, sikap dan persepsi yang berbeda ketika mengamati suatu fenomena. Jadi memakai dua atau bertambah peneliti akan memberikan informasi yang lebih jitu. Akan tetapi, sebelumnya tim peneliti harus menyepakati definisi standart observasi dan wawancara.

3.6.3 Triangulasi Sumber Data

Triangulasi ini adalah perbandingan atau verifikasi informasi dari berbagai sumber. Contohnya membandingkan hasil wawancara bersama observasi lapangan, membandingkan berita publik dan individu, atau membandingkan hasil wawancara bersama dokumen yang tertera.

3.6.4 Triangulasi Teori

Triangulasi ini melibatkan perbandingan data dari dua atau lebih teori. Kesimpulan kemudian ditarik dari data demi mencegah bias hasil antara peneliti. Oleh karenanya, dibutuhkan rencana

penelitian yang lebih komprehensif untuk penggabungan dan analisis data.

Metode triangulasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi dimana peneliti menggunakan hasil wawancara bersama kepala cabang pada observasi lapangan. Melalui cara ini kita dapat melihat apakah penjelasan kepala cabang telah sinkron dengan praktiknya.

3.6 Teknik Analisis Data

3.5.1 Reduksi Data

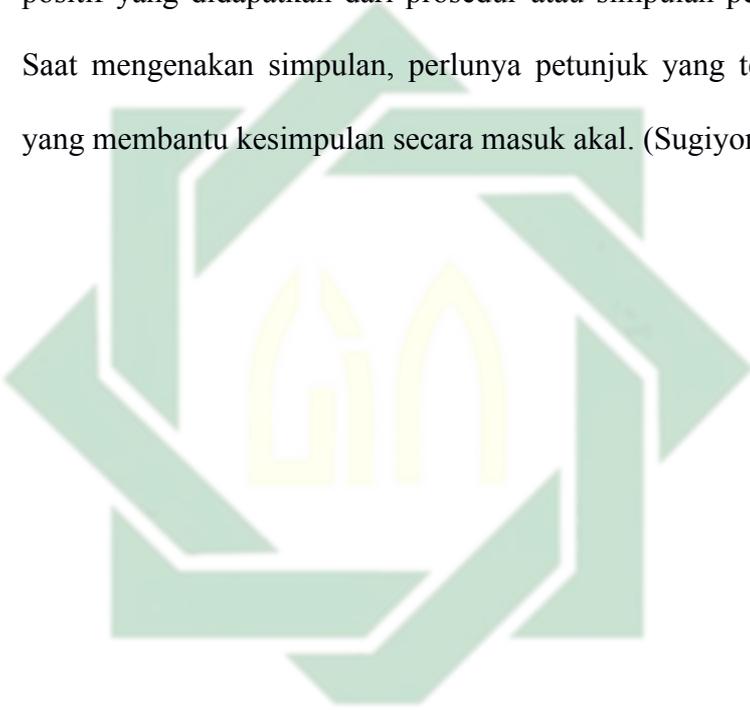
Meringkas informasi yang dipelajari, memilih poin kunci, fokus pada inti pokok, topik serta pola. (Sugiyono, 2013), Inti pokok yang didapat memberi peneliti gambaran yang jelas untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Reduksi fakta ini berfokus terhadap karakter, cara serta letak kerja, hubungan social.

3.5.2 Penyajian Data

Informasi yang terkumpul terhadap penelitian ini dijabarkan berbentuk tabel, grafik dan lain-lain jika diperlukan. Mengembangkan fakta-fakta ini, fakta di organisasikan dan mengaturnya sebagai bentuk relasional supaya gampang dimengerti. penyampaian informasi dimohon dapat membantu ketika mengetahui apa yang berlangsung dalam menyusun tahapan pekerjaan berikutnya.

3.5.3 Kesimpulan

Dilakukan dengan menganalisis informasi yang ditemui dan mengetahui sebab peristiwa yang ditemukan dalam peneliti, dengan mempertimbangkan dasar penelitian yang ditemukan serta upaya positif yang didapatkan dari prosedur atau simpulan peneliti tersebut. Saat mengenakan simpulan, perlunya petunjuk yang tepat serta asas yang membantu kesimpulan secara masuk akal. (Sugiyono, 2013)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS)

1. Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS)

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA"(BUS) berlokasi Jl. Sunan Giri no.20, Sukorejo 02/01 Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62215. Dan pusatnya berada pada Jalan Untung Suropati Nomor 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah, didirikan tanggal 10 11 1996, berlandaskan Anggaran Dasar yang ditetapkan surat ketetapan Nomor 13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 03 1998 oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Selama beroperasi, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) menghadapi kendala berubahnya anggaran dasar berkali-kali, dan yang terakhir berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001900.AH.01.39.Tahun .2022 tanggal 10 Agustus 2022 disahkannya Akta Perubahan AD Nomor 84 tanggal 21 Juli 2022 dengan Moch. Miftachul Zamroni Fatah, S.H.,M.Kn. Dengan kedudukannya di rembang perihal:

“Deklarasi keputusan RAT KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) perihal berubahnya visi misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS), syarat-syarat pemilihan pengurus, diwajibkan mengantongi rekomendasi dari DSN MUI atau sertifikat-sertifikat”

Selaras dengan Anggaran Dasar, Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota khusus dan masyarakat umum, serta melaksanakan perekonomian yang demokratis dan adil. Guna terwujudnya tujuan koperasi, diselenggarakanlah aktivitas usaha finansial, sewa, jasa, melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Kantor Pusat KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) beralamat pada Jalan Untung Suropati Nomor 16 Kec.Lasem, Kab. Rembang-Jawa Tengah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global. Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Karena perkembangan lembaga ini

mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tanggal 31 Maret 1998 dilakukan perubahan menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan badan hukum nomor: 1308/BH/KWK.11/VII/2002. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini juga mengalami perubahan anggaran dasar sebagai berikut :

a. 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, 1 Juli 2002

- 1) Dari Koperasi Serba Usaha KSU menjadi KSPS
- 2) Wilayah kerja dari Rembang menjadi Jawa Tengah

2. 04/PAD/KDK/.11/IV/2006, Tgl 4 April 2006

- 1) Dari KSPS menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS

c. 09/PAD/KDK.11/IV/2007

d. 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014, Tgl 26 Maret 2014

- 1) Dari KJKS menjadi KSPS

- 2) Penggabungan wilayah kerja DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjadi seluruh Indonesia

e. 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015, Tgl 15 Desember 2015

- 1) Dari KSPS menjadi KSPPS

f. Akta Nomor 13 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Pengesahan

No. 915/PAD/M.KUKM.2/I/2015, Tgl 30 Januari 2019

g. Akta Nomor 01 Tanggal 1 April 2019 dengan Pengesahan

No. 1163/PAD/M.KUKM.2/VIII/2019, Tgl. 23 Agustus 2019

1) Penggabungan dengan BMT BUS Jatim

h. Akta Nomor 10 Tanggal 10 November 2020 dengan Pengesahan

No. AHU-0001957.AH.28.TAHUN 2020, Tgl. 16 November 2020

1) Perubahan Susunan Pengawas

2) Perubahan Pasal 41 ayat e

i. Akta Nomor 84 Tanggal 21 Juli 2022 dengan Pengesahan

No. AHU-0001900.AH.01.39.TAHUN 2022, Tgl. 10 Agustus 2022

1) Perubahan Visi dan Misi KSPPS BMT BUS

2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus

3) Salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki sertifikat atau rekomendasi dari DSN MUI

Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini yang menjadi dasar terbentuknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) berdiri

bermula dari sebuah keprihatinan melihat perekonomian masyarakat lapisan bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) ini didirikan pada tahun 1996 oleh para cendekiawan muslim indonesia pusat Rembang berusaha menggerakkan dengan cara mendirikan lembaga keuangan alternatif yang bergerak pada usaha simpan pinjam yang dimotori oleh gerakan kelompok swadaya masyarakat. Orang yang memprakarsai didirikannya lembaga keuangan ini adalah Drs. Abdullah Yazid, MM.

Seiring dengan perjalanannya Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) mendapat respon baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 nama KJKS berubah menjadi Koperasi Serba Usaha(KSU). Kemudian di tahun 2002 nama Koperasi Serba Usaha(KSU) berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah(KSPS). Tercatat di tahun 2011 BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) telah memiliki 68 cabang yang sudah tersebar di seluruh wilayah indonesia tidak hanya di lingkup pulau jawa saja melainkan perkembangannya sudah sampai ke luar pulau jawa. Kantor pusat BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) ini berlokasi di Jl. Untung Suropati No.16 Lasem, Kab Rembang,Jawa Tengah.

Pada bulan november tahun 1996 tepatnya pada saat BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) pertama didirikan modal awal yang digunakan hanya Rp. 2.000.000 dibawah Abdullah Yazid, pekerjaan yang pertama kali dilakukan adalah segmentasi pasar, segmen pasar yang menjadi target sasaran BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) adalah pasar-pasar tradisional. Sampai saat ini BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dibuktikan dengan BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) yang telah memiliki 118 cabang yang tersebar di 7 provinsi yang ada di indonesia yaitu, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Adapun letak kantor layanan tersebut adalah sebagai berikut:

1	KANTOR CABANG UTAMA REMBANG (LASEM)	Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem Kec. Lasem-Rembang Telp. 0295 – 532376
2	CABANG PASAR LASEM	Jl. Kios Terminal No. 4 Gedongmulyo 03/01 Kec. Lasem-Rembang Telp. 0295 – 5391341
3	CABANG LASEM KOTA	Jl Sunan Bonang Km 01, Soditan 002/001 Kec. Lasem-Rembang
4	CABANG PANCUR	Jl. Raya Pamotan, Pancur 11/11 Kecamatan Pancur-Rembang Telp. 0295-531832
5	CABANG KALIORI	Jl. Raya Pati Rembang No. 19, Tambakagung 03/01 Kec.

		Kaliori-Rembang Telp. 0295 – 4746448
6	CABANG SUMBER	Jl. Raya Sumber Rembang No. 10, Sumber 02/01 Kec. Sumber-Rembang
7	KANTOR CABANG UTAMA REMBANG II (PANDANGAN)	Jl. Pandangan – Sedan No. 3, Plawangan 03/01 Kec. Kragan-Rembang
8	CABANG KRAGAN	Jl. Raya Kragan No. 14, Karangharjo 01/01 Kec. Kragan-Rembang
9	CABANG SARANG	Jl. Raya Sarang No. 27, Bajingjowo 02/01 Kec. Sarang-Rembang
10	CABANG SEDAN	Jl. Raya Sedan Km 1, Sedan 01/01 Kec. Sedan-Rembang
11	CABANG SLUKE	Jl. Raya Sluke, Sluke 03/01 Kec. Sluke-Rembang Telp. 0295 – 4552769
12	KANTOR CABANG UTAMA BLORA (CEPU)	Jl. Mutiara no 14, Karangboyo Kec. Cepu–Blora Telp. 0296-424395
13	CABANG BLORA KOTA	Jl. Nusantara No. 12 B Jetis-Blora Telp. 0296 – 531977
14	CABANG RANDUBLATUNG	Kios Pasar No. 6 -7 Kel. Wulung, Randublatung Telp. 0296-810197
15	CABANG NGAWEN	Jl. Raya Ngawen Km12, Sukolilo Kec. Ngawen-Blora Telp. 0296-361491
16	CABANG KUNDURAN	Jl. Raya Purwodadi – Blora KM 23, Kunduran 08/01 Kec. Kunduran-Blora
17	KANTOR CABANG UTAMA PATI (UNDAAN)	Jl. Kudus – Purwodadi Km 6, Kalirejo Kec. Undaan-Kudus
18	CABANG KUDUS KOTA	Ruko Lt. 1B No. 27 Pasar Kliwon, Nganguk Kec. Kudus-

		Kudus Telp. 0291 – 4101177
19	CABANG DAWE	Jl. Gang Pasar, Cendodo 07/02 Kec.Dawe-Kudus Telp. 0291- 420011
20	CABANG JEKULO	Komplek Pasar Jekulo Baru Blok X 02, Jekulo Kec. Jekulo- Kudus
21	CABANG MIJEN	Jl. Raya Kudus Jepara KM 5, Mijen Kec. Kaliwungu-Kudus Telp 0291 – 2911546
22	CABANG PATI	Jl. Kolonel Sunandar, Komplek Pasar Puri no.3 Puri Kec. Pati- Pati Telp. 0295-383088
23	CABANG JUANA	Komplek Pasar Baru Blok Eks II No.17, Growong Kec. Juwana-Pati Telp. 0295-471741
24	CABANG TAYU	Jl. Ahmad Yani No. 4 Tayu, Pati
25	CABANG SUKOLILO	Jl. Raya Sukolilo No. 56, Sukolilo 5/6 Kec. Sukolilo-Pati Telp. 0295-4101236
26	CABANG KELET	Jl. Raya Kelet, Kelet 15/12 Kec. Keling-Jepara Telp. 0291- 578192
27	KANTOR CABANG UTAMA JEPARA	Jl. Terminal Lama, Kel. Jobokuto 05/02 Kec. Jepara- Jepara Telp. 0291 – 4299785
28	CABANG PECANGAAN	Jl. Raguklampitan Sub Terminal Pecangaan Kec. Pecangaan-Jepara Telp. 0291 – 754691
29	CABANG KALINYAMATAN	Jl. Jepara – Kudus Km. 16, Margoyoso 04/03 Kec. Kalinyamatan-Jepara Telp. 0291 – 755139
30	CABANG WELAHAN	Jl. Cemara Komplek Pasar Welahan, Welahan 05/04 Kec. Welahan-Jepara Telp. 0291 – 4256195

31	CABANG MAYONG	Jln. Jepara – Kudus Ruko Pelemkerep No. 6 Kec. Mayong-Jepara Telp. 0291 – 4256492
32	CABANG BATEALIT	Jl. Bawu- Batealit Km 06 Tahunan, Mindahan 02/02 Kec. Batealit-Jepara Telp. 0291-4298083
33	KANTOR CABANG UTAMA PURWODADI	Jl. Dr. Sutomo No. 13, Kalongan 01/01 Kec. Purwodadi-Grobogan Telp. 0292 – 4219559
34	CABANG TOROH	Jl. Raya Purwodadi – Solo Km 11, Desa Depok Selatan 5/2 Kec. Toroh-Grobogan
35	CABANG TAWANGHARJO	Jl. Raya Purwodadi – Blora Km 10, Tawangharjo 02/02 Kec. Tawangharjo-Grobogan Telp. 0292-7620025/7631310
36	CABANG NAMBUHAN	Jl. Danyang – Kuwu Km 12, Nambuhan no 10 Kec. Nambuhan-Grobogan Telp. 0292-5140001
37	CABANG JAMBON	Dusun Mangsulan 4/6 Kec. Pulokulon-Grobogan
38	CABANG TUKO	Krajan Lor 5/1 Tuko Kec. Pulokulon-Grobogan Telp. 0292 – 7621053
39	CABANG KRADENAN	Jl. Raya Kradenan 34, Kradenan 08/02 Kec. Kradenan-Grobogan Telp. 0292 – 761402
40	CABANG GABUS	Jl. Sulursari-Kuwu, Bungas Sulursari 08/04 Kec. Gabus-Grobogan Telp. 0292-5160390
41	CABANG GEYER	Jl. Purwodadi – Solo Km. 17 , Muneng 01/01 Ledokdawan Kec. Geyer-Grobogan Telp 0292-5500197
42	CABANG WOLO	Jl. Godong-Karangrayung Kerep, Anggaswangi 04/02

		Kec. Godong-Grobogan Telp. 0292-4280069
43	CABANG GINGGANG	Jl. Jeketro-Truko, Jeketro 01/01 Kec. Gubug-Grobogan Telp. 0292-5135564
44	CABANG GUBUG	Jl. Ahmad Yani No. 107, Gubug 04/01, Kec. Gubug-Grobogan Telp. 0292 – 533538
45	KANTOR CABANG UTAMA SOLO RAYA	Jl Raya Solo-Sukoharjo no.33 A, Telukan 01/18 Kec. Grogol-Sukoharjo Telp. 0271-6727343
46	CABANG CARIKAN	Jl. Pemuda Barat no.85, Dk Tegalharjo 03/05 Sukoharjo Kec. Sukoharjo-Sukoharjo Telp. 0271-1590345
47	CABANG POLOKARTO	Jl. H. Muslich Dk.Blimbing 02/06 Wonorejo Kec Polokarto-Sukoharjo Telp. 0271-611699
48	CABANG TAWANGSARI	Dk. Karangasem 01.03 Kateguhan Kec. Tawang Sari-Sukoharjo Telp. 0272-881350/0271-5992229
49	CABANG WONOGIRI	Jl. Kepodang VI, Sukorejo 1/9 Giritirto Kec. Wonogiri-Wonogiri Telp. 0273-321758
50	CABANG SAMBI	Jl. Sambu – Mangu Dukuh Semono RT 09 RW 03 Desa Tempursari Kec Sambu-Boyolali
51	CABANG GONDANGREJO	Jl. Solo – Purwodadi Km. 12, Tuban 1/8 Kec. Gondangrejo-Karanganyar Telp. 0271-6812416
52	CABANG KALIJAMBE	Jl. Raya Karangjati-Batangan Km 1,3 los Pasar Saren no. 3&4 Saren 10 Kec. Kalijambe-Sragen
53	CABANG MASARAN	Jl. Raya Sragen – Solo Km 10, Krikilan 24 Kec. Masaran-Sragen Telp 0271-8200047

54	KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG	Jl. Wolter Monginsidi No. 88, Banjardowo 03/02 Kec. Genuk-Kota Semarang Telp. 024 – 6584134
55	CABANG SEMARANG KOTA	Jl. Bangunharjo no.58, Bangunharjo 8/2 Kec. Semarang Tengah-Kota Semarang Telp. 024 – 86570823
56	CABANG BANYUMANIK	Jl. Rasamala Raya no. 378, Sronдол Wetan 07/06 Kec. Banyumanik-Kota Semarang Telp 024-7464731
57	CABANG KARANGJATI	Jl. Raya Karangjati no.18, Karangjati 05/08 Kec. Bergas-Kabupaten Semarang Telp. 0298-5200037
58	CABANG SALATIGA	Jl Kalinyamat Ruko Pasar Raya I Blok D No 13, Kutowinangun Kidul Kec. Tingkir-Salatiga Telp. 0298-6031398
59	CABANG DEMAK	Jl. Raya Demak-Kudus, Ruko Bintoro No.07, Bintoro 03/06 Kec. Demak-Demak Telp. 0291-681701
60	CABANG BUYARAN	Komplek Pasar Buyaran no.16 Blok C, Karang Sari Kec. Karangtengah-Demak Telp. 0291-690116
61	CABANG SAYUNG	Jl. Raya Semarang-Demak Km.10, Komplek Ruko Pasar Sayung Kec. Sayung-Demak Telp. 024 – 6590924
62	CABANG MRANGGEN	Komplek Pasar Baru Mranggen No. 22, Kec. Mranggen-Demak Telp. 024 – 76411809
63	CABANG KARANGAWEN	Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Brambang 02/02 Kec. Karangawen-Demak Telp.0247-6412729
64	CABANG DEMPET	Jl Raya Dempet-Mintreng, Botosengon 01/02 Kec.

		Dempet-Demak Telp. 0291-6905010
65	CABANG KENDAL	Kios Terminal Blok A No. 7-8, Pegulon Kec. Kendal-Kendal Telp. 0294-3687048
66	CABANG KALIWUNGU	Jl. Soekarno – Hatta, Karangtengah Kec.Kaliwungu-Kendal Telp. 0294-3688823
67	CABANG LIMPUNG	Komplek Ruko Terminal Limpung Blok E No. 89, Limpung Kec. Limpung-Batang Telp. 0285-4468083
68	CABANG BANJARMASIN	Jl. Sulawesi no. 9 Rt 09 Rw 01 Kelurahan Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
69	KANTOR CABANG UTAMA YOGYAKARTA	Jl. Kradenan Raya No. 62, Maguwoharjo Kec. Depok-Sleman Telp. 0274- 4332351
70	CABANG PRAMBANAN	Jl. Prambanan-Piyungan, Bokoharjo Kec. Prambanan-Sleman Telp. 0274-2850389
71	CABANG GODEAN	Jl. Godean Km 10, Sidoagung 04/08 Kec. Godean-Sleman Telp.0274-6499820
72	CABANG GUNUNGKIDUL	Ds. Gejahan 02/03 Kec. Ponjong-Gunugkidul Telp. 0274-3950089
73	CABANG MUNTILAN	Jl. Pemuda, Ruko Plasa Baru Blok B1 No. 16 Gunungpring Kec. Muntilan-Magelang Telp. 0293-586721
74	KANTOR CABANG UTAMA TEGAL	JL Kapten Sudibyo No 234, Debong Lor 3/2 Kec. Tegal Barat-Kota Tegal Telp. 0283-325234
75	CABANG SLAWI	Jl. Letjend Suprpto, Ruko Slawi Blok E No 7, Pakembaran Kec. Slawi- Kab.

		Tegal Telp. 0283-491778
76	CABANG KETANGGUNGAN	Jl. Jend Sudirman, Perum Griya Pesona Ruko A4, Ketanggungan Kec. Ketanggungan- Brebes Telp. 0283 – 881382
77	CABANG LARANGAN	Jl. Tirto No. 22, Larangan Kec. Larangan-Brebes Telp. 0283 – 6183834
78	CABANG BUMIAYU	Jl. Diponegoro no.134, Bumiayu 03/02 Kec. Bumiayu- Brebes Telp. 0289 – 432887
79	CABANG BULAKAMBA	Jl. Raya Bulakamba, Bulusari Kec. Bulakamba-Brebes Telp. 0283 – 6180090
80	CABANG LOSARI	Jl. Jendral Sudirman No. 9, Losari Lor 09/01 Kec. Losari- BrebesTelp 0231-831532
81	CABANG AJIBARANG	Komplek Pasar Burung Ruko No. 5 Pasar Ajibarang- Banyumas Telp. 0281-571916
82	CABANG PEMALANG	Jl. Jend. Sudirman, Ruko Perhutani Blok A no. 2, Mulyoharjo Kec. Pemalang- Pemalang Telp. 0284 – 323117
83	CABANG COMAL	Jl. Gatot Subroto Ruko No. 13, Purwoharjo Kec. Comal- Pemalang Telp. 0285-577931
84	CABANG INDRAMAYU	Jl. Raya Pasar Baru Ruko No 17, Karangmalang Kec. Indramayu-Indramayu Telp. 0234-5746260
85	KANTOR CABANG UTAMA TUBAN	Jl. M. Yamin No. 22, Gedongombo Kec. Semanding- Tuban Tuban Telp. 0356 – 325444
86	CABANG MERAK URAK	Jl Raya Merakurak – Tuban, Sambonggede 03/07 Kec. Merakurak-Tuban
87	CABANG	Jl. Raya Montong – Tuban,

	MONTONG	Montong Sekar Kec. Montong-Tuban
88	CABANG KEREK	Jl. Raya Kerek – Montong, Margomulyo Kec. Kerek-Tuban
89	CABANG TAMBAKBOYO	Jl. Raya Kenanti, Kenanti04/04 Kec. Tambakboyo- Tuban Telp. 0356 – 412576
90	CABANG BULU	Jl. Dusun Kauman, Bulujowo 01/01 Kec. Bancar-Tuban, Telp. 0356 – 413050
91	CABANG JATIROGO	Jl. Raya Jtirogo-Bojonegoro, Sugihan Kec. Jatirogo-Tuban
92	CABANG BANGILAN	Jl. Raya Bangilan-Senori, Dk Pulut Bangilan 01/02 Kec. Bangilan-tuban
93	CABANG SINGGAHAN	Jl. Jatirogo – Bojonegoro No. 8 Mulyorejo, Singgahan, Tuban
94	CABANG RENGEL	Jl. Raya Rengel, Dk Rahayu Lereng Kuning 01/01 Rengel Kec. Rengel-Tuban Telp. 0356 – 811257
95	CABANG PLUMPANG	Jl. Plumpang – Rengel, Ngrayung 05/01 Kec. Plumpang-Tuban
96	CABANG BOJONEGORO	Jl. MH Thamrin No.06, Klangon Kec. Bojonegoro-Bojonegoro
97	KANTOR CABANG UTAMA LAMONGAN	Jl. Sunan Giri no.20, Sukorejo 02/01 Kec. Lamongan-Lamongan Telp. 0322-3101311
98	CABANG BABAT	Pasar Baru Babat Blok S/N/9, Banaran Kec. Babat-Lamongan
99	CABANG PACIRAN	Jl. Raya Deandles, Kandangsemangkon 01/03 Kec. Paciran-Lamongan
100	CABANG BUNGAH	Jl. Raya Bungah, Ruko Regency no.02 Bungah Kec. Bungah-Gresik

101	CABANG CUKIR	Jl. Raya Kediri-Jombang, Kayangan Kec. Diwek- Jombang
102	CABANG MOJOAGUNG	Jl. Sumobito No. 16, Gambiran Kec. Mojoagung-Jombang Telp 0231-491122
103	CABANG PLOSO	Jl. Raya Ploso no.149, Rejoagung Kec. Ploso- Jombang
104	CABANG MOJOKERTO	Jl. Wijaya Kusuma Ruko no.6, Banjaragung Kec. Puri-Kab. Mojokerto
105	CABANG NGANJUK	Jl. Dr. Soetomo, Ruko Palm Asri, Warujayeng Kec. Tanjunganom-Nganjuk
106	CABANG PARE	Jl. Puncakjaya no.24, Pare 02/01 Kec. Pare-Kab. Kediri
107	KANTOR CABANG UTAMA DKI (PONDOKGEDE)	Jl. Raya Pondok Gede No. 1 Rt 06/01 Lubang Buaya, Cipayung-Jakarta Timur 13810 Telp. 021 – 87781710
108	CABANG HUSNAYAIN	Jl. Lapan No. 25 Rt 09/ Rw 03 Kelurahan Pekayon Kec Pasar Rebo-Jakarta Timur Telp. 021- 21387523
109	CABANG CICURUG	Kp Caringin Lapang Rt 3 Rw 5 Desa Nyangkowek Kec Cicurug -Sukabumi Telp 0266- 733244/6726245
110	CABANG TANJUNG PRIOK	Jl. Wijaya Kusuma no.37 D Rawa BadakUtama 01/06 Koja- Jakarta Utara Telp. 021 – 29467897
111	KANTOR CABANG UTAMA PONTIANAK	Jl. Husein Hamzah no.41 A-B, Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat-Pontianak, Kalimantan Barat Telp. 0561- 772634
112	CABANG SUNGAI PINYUH	Jl. Jurusan Mempawah No. 06, Sungai Pinyuh Kec. Sungai

		Pinyuh-Mempawah, Kalimantan Barat
113	CABANG SAMBORA	Desa Sambora 04/02 Kec. Toho-Mempawah, Kalimantan Barat
114	CABANG MEMPAWAH	Jl. Teratai No. A2, Terusan Kec. Mempawah Hilir- Mempawah, Kalimantan Barat
115	CABANG ANJUNGAN	Jl. Pasar lintang Anjungan, Anjungan Melancar 04/01 Kec. Anjungan-Mempawah, Kalimantan Barat
116	CABANG MANDOR	Jl. Raya Ngabang No. 8, Mandor 03/01 Kec. Mandor- Landak, Kalimantan Barat
117	CABANG RASAU JAYA	Jl. KH. Abdurrahman Wahid, Kuala Dua Kec. Sungai Raya- Kubu Raya, Kalimantan Barat
118	CABANG SINTANG	Jl. Yc. Oevang Oeray, Baning Kota 14/03 Kec. Sintang- Sintang, Kalimantan Barat

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan yang juga merupakan kantor utama di Jawa Timur resmi beroperasi sejak tahun 2012. Hal yang mendasari dibukanya kantor BMT Cabang Lamongan adalah karena kebutuhan masyarakat setempat akan permodalan usaha dan juga penyimpanan aset keuangan, guna memberikan kemudahan pelayanan transaksi kepada para anggotanya. Oleh sebab itu KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan resmi didirikan atas perizinan dari dinas Koperasi dan Usaha mikro daerah setempat.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan ummat pada

umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSPPS BMT “BINA UMMAT SEJAHTERA” (BUS) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, menyelenggarakan kegiatan usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta mengadakan kerjasama antar koperasi juga badan usaha lainnya. Sebagai pedoman kerja maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) mempunyai Motto, Visi dan Misi sebagai berikut :

2. **Moto Visi dan Misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS)**

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera menyusun motto, visi, dan misinya sebagai pedoman dalam bekerja, yaitu sebagai berikut:

Motto :

“Bersinergi Menuju Kemandirian” (Berkhidmat Untuk Ummat, Bersinergi Menuju Kemandirian Ekonomi)

Visi :

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mampu Bersinergi dalam Menggali Potensi untuk Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Ummat.”

Misi :

- a. Memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.
- b. Meningkatkan kualitas Tata Kelola lembaga dengan digitalisasi dan SDI yang kompeten serta berintegritas berdasarkan prinsip syariah.
- c. Memperkuat Pendidikan, pelatihan dan pendampingan guna mengembangkan dan mensinergikan usaha anggota dalam bidang pangan, sandang, papan dan fasilitas hidup (ketahanan pangan dalam arti kesediaan pangan dan kemampuan mengaksesnya, industry dan pemerataan distribusi) sehingga menjadi umat mandiri.
- d. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro dan kecil serta mewujudkan akuntabilitas manajemen zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWA), sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
- e. Menjalin kemitraan yang sinergi dengan lembaga lain, sehingga mampu membangun kemandirian ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.

- f. Mewujudkan lembaga yang mampu membebaskan, memberdayakan dan membangun keadilan ekonomi umat, untuk menghantarkan umat Islam.

Sasaran :

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) menggunakan jaringan dan pengalaman untuk memfokuskan usahanya untuk:

- a. Membina pelaku usaha kecil menjadi lebih unggul.
- b. Menjadi lembaga penengah, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana Anggota dan Calon Anggota permanen secara berkelanjutan agar berkembangnya ekonomi produktif bagi kebaikan masyarakat.
- c. Aktif dalam program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan
- d. Meningkatkan derajat kaum fakir miskin menjadi lebih baik,
- e. Menciptakan keseimbangan kehidupan yang aman, damai, makmur, dan adil dalam perekonomian yang setara antara yang miskin dengan kaum berada.

3. Budaya Kerja

Budaya kerja yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) disusun berlandaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, Meneladani empat sifat Rosulullah yang sering disebut dengan SAFT, yaitu:

a. Shidiq

Memelihara integritas diri, yang ditandai dengan keikhlasan niat, hati yang bersih, berpikir jernih, berbicara kebenaran, menghindari perilaku tercela, dan menjadi tauladan.

b. Amanah

Dapat dipercaya, peka, objektif, memiliki kedisiplinan, dan bertanggung jawab.

c. Fathonah

Profesionalisme yang beinovasi, cerdas, kompeten dengan semangat untuk terus belajar dan berlatih.

d. Tablig

Terampil komunikasi yang dilandasi keterbukaan, dukungan, dan memberdayakan dengan adil.

4. Program Unggulan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS)

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera membagi produknya menjadi dua bagian besar sebagai berikut:

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Relat)
- 2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)
- 3) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)
- 4) Simpanan Haji dan Umroh (SI HAJI DAN UMROH)

- 5) Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SI Hafit)
 - 6) Simpanan Sekolah
- b. Produk Pembiayaan / kredit
- 1) Produk Pembiayaan Ultra Mikro (Umi)
 - 2) Produk Pembiayaan ANITA (Air dan Sanitasi)
 - 3) Produk Pembiayaan Modal Usaha
 - 4) Produk Pembiayaan Investasi
- c. Pendampingan

Bagian Pendampingan memiliki hubungan yang kuat dengan keamanan dan kesuksesan produk keuangan, sehingga keduanya saling memberikan dukungan dan memberikan evaluasi akan rencana dan capaian kinerjanya. Supaya alur tersebut dapat bekerja dengan baik, bagian pendampingan harus melakukan tugas-tugas berikut:

- 1) Pendampingan Manajemen Usaha
 - 2) Pendampingan Permodalan
 - 3) Pendampingan Pemasaran
 - 4) Pendampingan Jaringan Usaha
- d. Baitul Maal

Bagian Baitul Maal berpotensi sangat tinggi untuk menjadi penguat dari lembaga ini, dikarenakan dengan baitul maal yang intensif maka dapat digunakan untuk

memberdayakan umat, yaitu membina usaha melalui pendanaan Qordul Hasan. Baitul Maal memperoleh sumber dana dari:

- 1) Zakat, infaq dan shodaqoh serta zakat tijaroh anggota modal kerja dan masyarakat
- 2) Memberdayakan zakat setiap bulan (2,5 % dari gaji).
- 3) Melakukan kerjasama dengan Laznas BMT Pusat terkait program menghimpun dan menyalurkan zakat.
- 4) Melakukan kerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika dalam program Tebar Hewan Qurban.

ZIS disalurkan kepada :

- 1) Menyantuni fakir miskin dan yatim piatu.
- 2) Membudayakan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota

KSPPS BMT BUS

- 3) Memfasilitasi peralatan ibadah di mushola dan masjid.
- 4) Memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu.
- 5) Memberi bantuan sosial kepada yang terdampak bencana.

Uraian di atas ialah gambaran singkat tentang Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera, sebagai Lembaga baru yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, terdapat keinginan yang tinggi untuk memahami bahwa koperasi adalah lembaga

ekonomi yang baik, demokratis, otonom, aktif berpartisipasi, dan memiliki watak sosial. Kami mengharapkan kerja sama, sinergi, dan pelatihan dari otoritas yang berwenang agar Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera dapat terdorong dalam melaksanakan kegiatan usaha serta berpartisipasi dalam mensejahterakan dan memakmurkan anggota khususnya serta masyarakat umum.

4.1.2 Analisis Penerapan Prinsip Transparansi

Berdasarkan dari hasil observasi mengenai prinsip transparansi oleh penulis terhadap KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dengan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka menurut Wahyudin Zarkasyi, hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Kemudahan Mengakses Informasi

KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan ialah suatu lembaga keuangan yang harus memudahkan anggotanya dalam mengakses informasi. KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam memudahkan anggota untuk mengakses informasi salah satunya dengan adanya mobile BUS digital yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS. Dengan adanya mobile BUS digital maka memudahkan anggota untuk mengecek dana yang dititipkan pada KSPPS BMT BUS. Hal ini merupakan bentuk transparansi kepada anggota yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan direktur

KSPPS BMT BUS sebagai berikut: “Prinsip transparansi di KSPPS BMT BUS untuk pelayanan anggota sudah menggunakan sistem online, sehingga untuk laporan dana anggota yang dititipkan berupa tabungan bisa diakses melalui BUS digital kemudian online itu bukan pakai catatan tangan akan tetapi langsung print, walaupun marketing jemput bola dipasar dia pakai invoice dulu dan bukunya dibawa nanti besoknya bukunya di kembalikan sudah diprint”.

2. Analisis Ketersediaan Informasi

Ketersediaan informasi yang ada pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sudah disampaikan dengan jelas di brosur yang sudah disediakan oleh KSPPS BMT BUS. Salah satunya pada brosur pembiayaan dimana disitu dijelaskan adanya syarat-syarat pengajuan pembiayaan serta daftar perkiraan angsuran pembiayaan. Berikut daftar perkiraan angsuran dengan plafon yang sudah ditentukan seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Data Perkiraan Angsuran Pembiayaan

Simulasi angsuran murobahah BULANAN			
PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU		
	12 Bulan	24 bulan	36 bulan
5,000,000	516,667	308,333	238,889
6,000,000	620,000	370,000	286,667
7,000,000	723,333	431,667	334,444
8,000,000	826,667	493,333	382,222
9,000,000	930,000	555,000	430,000
10,000,000	1,033,333	616,667	477,778
15,000,000	1,550,000	925,000	716,667
20,000,000	2,066,667	1,233,333	955,556
25,000,000	2,583,333	1,541,667	1,194,444
30,000,000	3,100,000	1,850,000	1,433,333
35,000,000	3,616,667	2,158,333	1,672,222
40,000,000	4,133,333	2,466,667	1,911,111
45,000,000	4,650,000	2,775,000	2,150,000
50,000,000	5,166,667	3,083,333	2,388,889
60,000,000	6,200,000	3,700,000	2,866,667
70,000,000	7,233,333	4,316,667	3,344,444
80,000,000	8,266,667	4,933,333	3,822,222
90,000,000	9,300,000	5,550,000	4,300,000
100,000,000	10,333,333	6,166,667	4,777,778

Sumber : KSPPS BMT BUS (2022)

3. Analisis Kerahasiaan Informasi

Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dituntut harus transparansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal itu tidak mengurangi kewajibannya untuk memenuhi ketentuan KSPPS BMT BUS perihal terjaganya kerahasiaan perusahaan yang selaras dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut ditunjukkan dengan dilarangnya mengambil data-data tertentu, contohnya data keuangan Penggajian Karyawan yang ada di KSPPS BMT BUS karena itu merupakan rahasia perusahaan, termasuk yang dirahasiakan adalah data pribadi anggota.

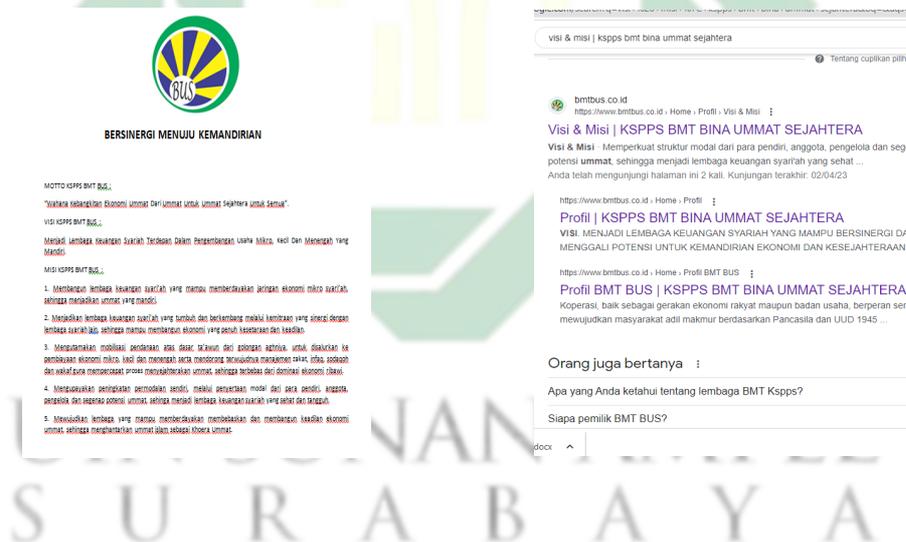
4. Analisis Penyampaian Kebijakan

Setiap perusahaan pastinya memiliki kebijakannya masing-masing, seperti pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan yang memiliki kebijakan seperti kebijakan AD/ART, SOP, kebijakan peraturan khusus, serta surat edaran yang semuanya sudah disampaikan kepada pengelola maupun karyawan dan sudah tertulis bahkan diarsipkan dengan baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara antara penulis dengan pimpinan KSPPS BMT BUS sebagai berikut:

“Kebijakan itu sendiri kan ada yang berupa AD/ART, SOP, kebijakan peraturan khusus, surat edaran itu sudah tertulis dan terdokumentasikan”.

5. Analisis Visi dan Misi Perusahaan

KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan mengenai visi dan misi perusahaan sudah tersedia di website maupun kantor sehingga anggota tidak bingung jika mau melihat visi dan misi pada KSPPS BMT BUS itu sendiri, serta tidak memiliki rasa keraguan lagi dalam menitipkan dananya di KSPPS BMT BUS.



Gambar 4.2 (Screenshoot Visi Misi)

Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pembacaan visi dan misi BMT BUS setiap hari oleh pengelola setelah tadarus qur'an bersama dan kultum yang disampaikan oleh pengelola.

4.1.3 Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan dari hasil observasi mengenai prinsip akuntabilitas penulis terhadap KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dengan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka menurut Wahyudin Zarkasyi, memperoleh hasil yang diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Perincian Tugas dan Tanggung Jawab

KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sudah ada rincian tugas secara tertulis dan setiap tugas memiliki tanggung jawabnya masing-masing yang disampaikan kepada semua pengelola. Dengan adanya tupoksi itu sendiri memudahkan semua pengelola untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan job discriptionnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara antara penulis dan manajer KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sebagai berikut:

“Kita bekerja sesuai dengan job discription dan tupoksi yang ada, setiap karyawan mempunyai jod discriptionnya masing-masing”.

“Diantara contoh Job discription yang berupa Job Authority manajer adalah :

- a. Secara teratur (harian, mingguan, dan bulanan) memantau dan mengontrol manajer submarketing untuk mencapai pendanaan, tabungan, dan NPF, sehingga target portofolio cabang tercapai s-d akhir tahun 2016.

- b. Berhak dan berwenang memberikan penilaian, masukan, koreksi perbaikan kepada AO dibawah supervisinya.
- c. Berhak dan berwenang melaporkan dan atau mengusulkan punishment jika dijumpai AO yang bermasalah.
- d. Memiliki hak dan wewenang untuk menawarkan penghargaan dan atau promosi jika ditemukan AO berprestasi.
- e. Memiliki hak dan wewenang menawarkan pemindahan.
- f. Memberi penjelasan terkait produk KSPPS BMT BUS kepada anggota dan calon anggota sesuai mandatnya
- g. Membuat dan memaparkan hasil analisis pengajuan pendanaan pada komite pembiayaan, sesuai SOP.
- h. Menjelaskan permintaan dana yang tidak memenuhi syarat
- i. Mengkomunikasikan kepada anggota hasil keputusan komite keuangan sebagaimana diarahkan dan dikuasakan oleh komite
- j. Berkomunikasi dengan pejabat formal dan non formal pada cabang usaha.
- k. Bertanggung jawab mengkoordinasikan kepada staffnya dalam penyusunan, penyusunan dan penyampaian laporan rutin dan non rutin ke kantor koperasi dan atau cabang lain untuk menghindari keterlambatan atau pengaduan eksternal.

Pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan bahwa adanya rangkap jabatan akan tetapi itu karena arahan dari kantor pusat dan menyesuaikan kondisi kantor. Hal tersebut ditunjukkan dengan

hasil wawancara antara penulis dan bagian marketing KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sebagai berikut :

“Kita bekerja sesuai dengan job description dan tupoksinya masing-masing dan adanya rangkap jabatan itu karena arahan dari pusat serta menyesuaikan kondisi kantor”. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan direktur KSPPS BMT BUS sebagai berikut :

“Mengenai rangkap jabatan tidak ada masalah asalkan rangkap jabatan itu di job yang bertentangan dan adanya miditasi resiko contohnya customer service dengan teller itu tidak boleh dirangkap dan kalau Marketing dirangkap dengan Relationship pembiayaan itu masih bisa dan kalau misalkan kita satu-satu semua maka antara yang dilayani sama pelayannya banyak pelayannya maka kita akan rugi, jadi ada saatnya kita rangkap jabatan dan ada saatnya kita pisah tergantung pada kebutuhan dan harus efesiensi dana perusahaan juga”.

2. Analisis Kompetensi yang Sesuai

KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam memberikan jabatan itu sudah diseleksi akan tetapi bukan di awal masuk karena awal masuk ke BMT adanya pelatihan 1 minggu Sebagai Pembekalan, lanjut OJT selama 3 bulan, lanjut pegawai kontrak 1 tahun selama 2 kali. Untuk tahun berikutnya baru bisa jadi pegawai tetap dan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan karyawan, Seperti

Pelatihan Sumber Daya Insani, Training Kerjasama Tim dll, Jadi mereka bekerja tidak atas permintaan karyawan akan tetapi dilihat dari bidang mana dia bisa bekerja. Dalam Penempatan Posisi Karyawan berdasarkan pada dua aspek yang pertama adalah Legal Formal yaitu disesuaikan dengan Tingkat Ijazah dan Keahlian, kedua berdasar pada Kemampuan Soft Skill yang dimiliki, hal ini disesuaikan dengan Sertifikat keahlian atau sertifikat pendukung yang dimiliki oleh karyawan

a. Job Specification Manager

Pendidikan : Minimal Strata 1

Pengalaman :

No	Minimum Kualifikasi	Keterangan
1	STAFF MARKETING	2 – 3 tahun

2) Soft Competency (Functional Specific)

- a) Mampu Mengelola dan Mengembangkan kemampuan staff dibawah supervisi dicabangnya dengan cara, selalu memantau pencapaian kinerja staff dibawah supervisinya, mendorong tim untuk mencapai sasaran kinerja.
- b) Kemampuan memperluas jaringan dan kerjasama

- c) Membangun KSPPS BMT BUS sebagai lembaga pembelajaran
- 3) Technical Competency
 - a) Mampu dan menguasai analisa keuangan secara umum
 - b) Mampu mengoperasikan computer (minimal Microsoft Office)
- 4) Pelatihan Yang Diperlukan :
 - a) Teknik kepemimpinan
 - b) Teknik motivasi kepada tim
 - c) Teknik analisa laporan keuangan lembaga
 - d) Teknik penjualan produk pembiayaan dan simpanan
 - e) Analisa pembiayaan dan persyaratan administrasinya ke BMTan
 - f) Manajemen Resiko - level 1
 - g) Pelatihan kesyari'ahan

b. Job Specification Teller

Pendidikan : Minimal SLTA sederajat

- 1) Ketrampilan atau Keahlian teller :
 - a) Menguasai word office informasi teknologi.
 - b) Kemampuan menghitung yang baik.
 - c) Menguasai persyaratan - persyaratan administrasi funding dan leanding.

- d) Bisa membaca Alqur'an, dan menjalankan syari'ah Islam.
- 2) Basic Mentality (pola pikir mendasar yang harus diikuti dan diinternalisasi oleh anggota ketika menerapkan Pengendalian Mutu Terpadu)
- a) Siddiq, Fathonah, Amanah, Tabligh (SFAT).
 - b) Mampu menjaga kerahasiaan lembaga.
 - c) Tidak melanggar etika lembaga.
 - d) Tidak emosional dan patuh pada atasan.
 - e) Berorientasi kepada penyelesaian tugas : Antusias & berusaha keras dalam bekerja
- 3) Technical Competency :
- Mampu mengoperasikan computer (minimal Microsoft Office)
- 4) Pelatihan yang diperlukan pada teller:
- a) Teknik motivasi
 - b) Teknik pelayanan transaksi Simpanan dan Pembiayaan
 - c) Pembukuan Dasar
 - d) Akuntansi Dasar
 - e) Pengetahuan produk dan keadministrasiannya
 - f) Ke BMTan
 - g) Pelatihan kesyari'ahan.
- c. Job Specification Staff Administrasi

Pendidikan : Minimal SLTA sederajat

1) Ketrampilan atau Keahlian :

- a) Menguasai teknik pelaporan keadministrasian yang efektif dan efisien
- b) Menguasai persyaratan administrasinya
- c) Memahami alur proses administrasi beserta resikonya

2) Pelatihan Yang Diperlukan :

- a) Dasar-dasar administrasi dan pelaporan
- b) Ke BMTan
- c) Pelatihan kesyari'ahan.

3. Analisis Sistem Pengendalian Internal

Pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan setiap bulannya adanya sistem pengendalian internal oleh Pengawas sebagai pelaksananya, serta adanya audit internal untuk mengevaluasi kinerja dari karyawan itu sendiri apakah sudah bekerja sesuai SOP atau tidak. Audit internal termasuk sistem pengendalian internal yang ada di KSPPS BMT BUS untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh karyawan maupun pengelola. Kalau adanya pelanggaran terus setelah ditelesuri dan bahwa pelanggaran itu terbukti adanya maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara antara penulis dan bagian marketing sebagai berikut :

KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sudah melakukannya (pengendalian internal) dari awal koperasi didirikan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah. Dan juga tidak lupa diawasi oleh Ketua Pengawas untuk KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan, dan Anggota. Dewan Pengawas Syariah dan Ketua Pengawas meninjau operasional kantor pusat sebanyak sekali dalam satu bulan, meski hanya sebatas perbincangan dengan Kepala KSPPS BMT Koperasi BUS Cabang Lamongan, dan tak luput untuk saling menyapa para rekan pengawas. Dewan pengawas datang untuk meninjau ataupun sekedar mengecek kegiatan marketing dan kantor KSPPS BMT BUS cabang Lamongan dan KSPPS BMT BUS cabang Lamongan sebanyak satu kali dalam seminggu. Tujuannya adalah untuk mengecek pegawai secara tatap muka. Pengawasan yang seperti itu sangat penting bagi mereka karena dapat sangat memotivasi pegawai dan membuat mereka merasa sangat dihargai atas pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pihak pengawas melakukannya dengan maksimal agar dapat mendorong pegawai untuk lebih efektif dalam bekerja.

Tabel 4.5 JOB RELATIONSHIP KSPPS BMT BUS
Cabang Lamongan

Internal

No	Unit Kerja	Keterangan
1.	Manager cabang	Atasan langsung
2.	Marketing Officer	Peer
3.	Area Manager	Atasan langsung
4.	Kabag Marketing	Peer
6.	Kabag Operasional	Peer
7.	Staff Marketing	Subordinate
8.	Teller	Subordinate

External

No	Unit Kerja	Keterangan
1	Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota	
2	Manajer BMT atau lembaga keuangan sejenis	
3	Kepala Sekolah/Instansi	
4	Ketua Organisasi Kemasyarakatan	

Sumber : KSPPS BMT BUS (2021)

Pemantauan oleh Pengawas KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan mencakup unsur ketiga dan kelima dari Pengendalian Internal, yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian,
- b. Penetapan Resiko Manajemen,
- c. Aktifitas Pengendalian dan Pemantauan,
- d. Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi,
- e. Pemantauan.

Karena pengawasan berfungsi untuk mengetahui berjalannya pengendalian internal apakah telah sejalan dengan tujuan yang ditentukan ataukah membutuhkan perbaikan-perbaikan.

Melakukan koordinasi, komunikasi yang baik secara internal :

- a. Di Pusat, dengan : Operational, Sapras, audit, dengan tujuan meningkatkan produktifitas tim dan personal dalam mencapai target bulanan yang telah ditetapkan.
- b. Dengan HC, terkait upaya pengembangan dan pembinaan pengelola di cabangnya guna pencapaian target yang telah disepakati.
- c. Aktif Mentransformasikan account assignment (lembar kerja monitoring atau kertas kerja per MO) dan tugas serta tanggung jawabnya kepada penggantinya, dalam hal terjadi peralihan tugas atau mutasi rotasi pengelola.
- d. Menjadi alternatif (petugas pengganti) bagi sesama Manager cabang pada saat manager cabang yang lain berhalangan hadir.

Setelah hal tersebut juga Di KSPPS BMT BUS itu sendiri kita ada audit internal, dimana itu untuk kinerja karyawan yang ada disini apalagi kita suka pegang uang anggota dalam jumlah banyak, maka bisa selalu dipantau agar bekerja mengikuti SOP yang ada. Banyak aturan-aturan yang ada, misalkan transaksi itu harus seperti apa, setiap harus harus laporan, ketika ada piutang jadi yang namanya audit internal itu penting agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan maupun pengelola dan bekerja mengikuti SOP dan tupoksi yang ditetapkan. Dan jika setelah diaudit adanya pelanggaran dan itu terbukti adanya maka akan dikenakan sanksi yang tegas”

4. Analisis Pengukuran Kinerja

Pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam mengukur kinerjanya dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah :

- a. Mengetahui produktivitas secara kuantitas
(Pencapaian Target)
- b. Semangat dalam Kontribusi
- c. Kedisiplinan
- d. Efektifitas Kinerja

Pencapaian Target kinerja perorangan Manager Cabang, merupakan gabungan (konsolidasi) dari target kinerja perorangan

seluruh karyawan marketing dan karyawan operasional yang dipimpinnya, yang termasuk dalam indikator keberhasilan kerja sesuai Target Kinerja 2022 yang telah disepakati bersama atasan.

Menyusun rancangan kerja untuk mencapai target individu dan rutin menginformasikan serta melakukan konsultasi rancangan pencapaian target tiap bulan dan tiap minggu pada pimpinan langsung (Manager Area) dan pimpinan dari pimpinan langsung (kepala wilayah) dalam bentuk Monitoring Mingguan 2021. Formulir Monitoring Mingguan 2021 tersebut yang telah diisi dengan rencana kunjungan kepada anggota yang menjadi target person tiap staff, wajib dijadikan bahan dalam meeting rutin bulanan di Area masing-masing.

Aktif dalam meeting koordinasi rutin yang diselenggarakan oleh Area, dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Meeting koordinasi awal bulan (setiap minggu pertama maksimal tanggal 5). Topic pembahasan : Rencana target simpanan dan pembiayaan perorangan untuk minggu 1,2,3,4.
- b. Meeting koordinasi akhir bulan (setiap minggu ketiga maksimal tanggal 20). Topic pembahasan : Kolektibilitas atas angsuran dari anggota-anggota yang tercantum dalam daftar Account Assignment (daftar anggota funding & lending yang menjadi tanggung jawab masing-masing staff marketing atau kertas

kerja per MO), termasuk monitor angsuran simpanan Si Sidik dan Si Mapan.

Dan hal yang paling utama adalah pencapaian target yang sudah direncanakan, jika target itu sudah tercapai itu karena kinerja di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sangatlah baik dan itu dapat dilihat dari bagaimana BMT melayani anggota atau melakukan kerjasama oleh pengelola BMT BUS Cabang Lamongan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan anggota pada KSPPS BMT BUS pada tabel sebagai berikut :

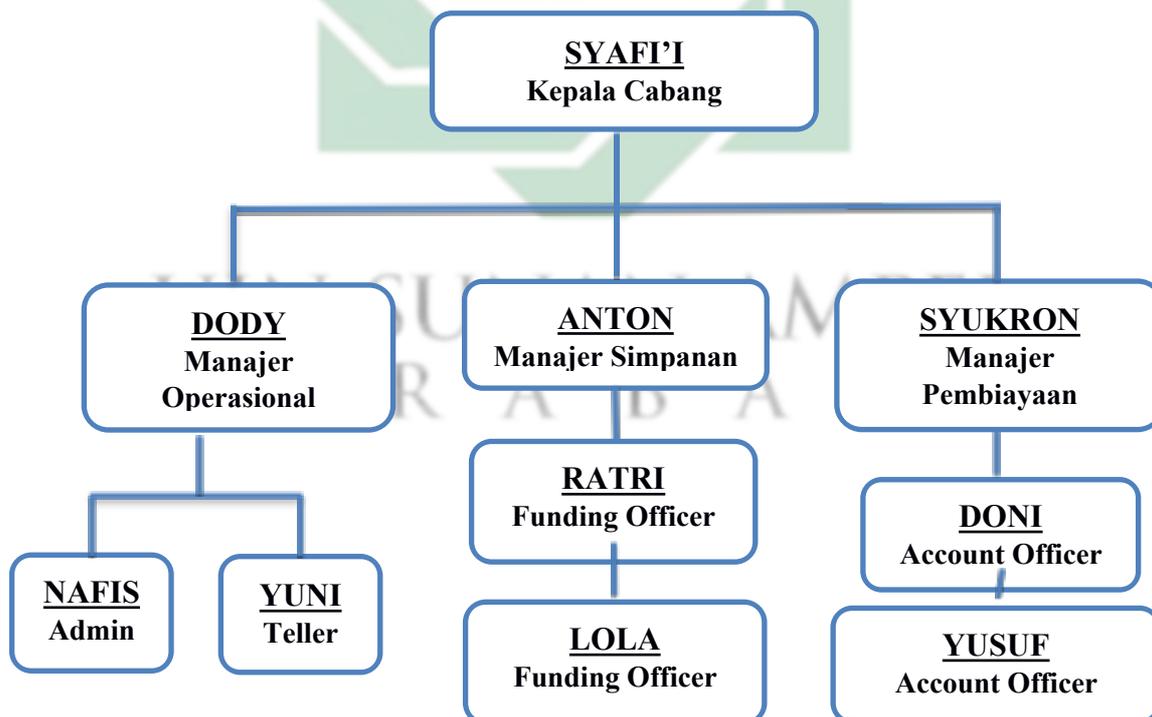
Tabel 4.6 Jumlah Anggota KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan

No.	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2020	3.129 Orang
2.	2021	3.725 Orang
3.	2022	3.806 Orang

Sumber : KSPPS BMT BUS (2022)

5. Analisis Pelaksanaan Tugas Sesuai Pedoman

KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam melakukan tugasnya sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Semua karyawan dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan SOP yang ada yang sudah disampaikan pada semua karyawan dalam bentuk Dokumen, seperti dalam bertransaksi itu seperti apa dan dalam melakukan survey pembiayaan itu seperti apa, karena itu semua sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Struktur Organisasi Instansi :



Gambar 4.3 Data Struktur Organisasi BMT BUS

Mereka bekerja juga sesuai dengan budaya kerja yang ada di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dengan acuan akhlaqul karimah dan kerahmatan sebagai prinsipnya. Terdapat empat sikap yang terinspirasi dari Rosulullah, sering disebut dengan SAFT, yaitu:

- a. Shidiq (menjaga integritas diri, ditandai dengan kejujuran, hati yang bersih, pikiran yang jernih, berbicara kebenaran, berperilaku terpuji dan menjadi tauladan).
- b. Amanah (dapat dipercaya, peka, objektif, berdisiplin, bertanggung jawab).
- c. Fathonah (profesionalisme, inovatif, cerdas, terampil dengan semangat untuk terus belajar dan berlatih).
- d. Tabligh (Berkompeten dalam komunikasi berdasarkan keterbukaan, dan adil dalam melakukan pemberdayaan) .

4.1.4 Analisis Penerapan Prinsip Responsibilitas

Berdasarkan dari hasil observasi mengenai prinsip responsibilitas oleh penulis di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dengan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka menurut Wahyudin Zarkasyi, hasilnya diuraian menjadi:

1. Analisis Kepatuhan Hukum

Pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam menjalankan bisnisnya berpegang pada undang-undang yang

berlaku sebagaimana PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Juga Fatwa DSN MUI, baik itu dalam membuat kebijakan peraturan perusahaan atau dalam Produk yang ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara antara penulis dan Manager Kepala Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sebagai berikut :

“KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”

2. Analisis Tanggung Jawab Sosial

Pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dapat melihat tanggung jawab sosialnya dari baitul maal. Dengan adanya baitul maal, memudahkan BMT BUS untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan dan setiap hari jumat selalu membagikan beras kepada masyarakat yang kurang mampu sebagaimana yang telah dilaksanakan yaitu pembagian beras kepada 20 masyarakat yang berhak menerimanya di lingkungan Desa Tumenggungan Kabupaten Lamongan masing masing mendapatkan 10 Kg beras Pada Hari Jum'at 22 Juli 2022, dan itu merupakan wujud pedulinya BMT kepada masyarakat. Pada KSPPS BMT BUS juga adanya pertanggungjawaban berjenjang dimana dilakukan evaluasi pencapaian target baik itu kualitatif maupun kuantitatif.

3. Analisis Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dapat dilihat dalam pemberian pembiayaan. Dimana dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota marketing diharuskan untuk mampu memperkirakan kemungkinan bisa atau tidaknya anggota tersebut mengangsur dan itu harus berpegang pada prinsip kehati-hatian karena untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menganalisa yang nantinya akan menyebabkan adanya kredit macet.

4.1.5 Analisis Penerapan Prinsip Independensi

Berdasarkan dari hasil observasi mengenai prinsip independensi oleh penulis di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dengan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka menurut Wahyudin Zarkasyi, hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam hal Analisis Dominasi dan Pengaruh KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan setiap pengambilan keputusan berdasarkan rapat komite yang bersifat kolektif dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah. dalam pengambilan keputusan tidak terpengaruhi keperluan pribadi dan terbebas dari pengaruh yang ada sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan manager kepala cabang Lamongan sebagai berikut :

“KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan setiap pengambilan keputusan berdasarkan rapat komite yang bersifat kolektif dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah”.

4.1.6 Analisis Penerapan Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran

Berdasarkan dari hasil observasi mengenai prinsip kesetaraan dan kewajaran oleh penulis di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dengan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustak sebagai berikut :

1. Analisis Kesempatan Berpendapat

Pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan selalu memberikan kesempatan berpendapat kepada karyawan dan pemangku kepentingan yang lainnya dengan adanya rapat yang selalu diselenggarakan setiap bulannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara antara penulis dan direktur KSPPS BMT BUS sebagai berikut :

“Setiap bulan KSPPS BMT BUS selalu mengadakan rapat baik itu rapat pimpinan, rapat manager kepala cabang dan yang lainnya”

2. Analisis Kesempatan Kompensasi

KSPPS BMT BUS sudah memberikan hak-haknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya kepada anggota maupun pemangku kepentingan yang lainnya.

3. Analisis Kesempatan Karyawan

KSPPS BMT BUS sudah meratakan kesempatan bagi seluruh karyawannya baik itu perihal mengembangkan karirnya dan fasilitas yang didapat. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara antara penulis dan direktur KSPPS BMT BUS sebagai berikut :

“Fasilitas yang didapat karyawan baik itu seragam, sepatu, jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan yang lainnya sudah diberikan kepada semua karyawan tanpa ada yang dibeda-bedakan dan selalu adanya pelatihan-pelatihan untuk karyawan yang selalu diselenggarakan oleh KSPPS BMT BUS diantaranya adalah Pelatihan tentang Sumber Daya Insani, Pelatihan Service Exceilent dan lainnya”.

4.1.7 Analisis Kendala dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.

Sudah menjadi hal yang wajar pada tiap lembaga saat beroperasi akan menemui kendala, di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan pun juga menemuinya. Saat menjalani operasionalnya, naik turunnya kedisiplinan karyawan lah yang menjadi kendala di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan, contohnya adalah beberapa keterlambatan yang dilakukan oleh karyawan. Pada umumnya dalam menerapkan GCG, faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi.

Di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan tidak ada factor eksternal yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan GCG. Namun kendala dalam penerapan GCG di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan hanyalah faktor internal yang menjadi masalahnya yaitu berasal dari lembaga itu sendiri. Masalah yang dimaksud ialah naik turunnya kedisiplinan karyawan. Jika karyawan telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, sehingga hal tersebut bukanlah kendalanya.

Berdasarkan kendala yang ditemukan tersebut, upayanya adalah dengan membuat tata tertib yang mewajibkan karyawan sebelum pukul 8 pagi sudah hadir di kantor dan karyawan yang memiliki kedisiplinan tinggi akan diberi reward agar selalu semangat untuk terus disiplin dan mampu memotivasi teman se profesi.

4.2 Pembahasan

Hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip GCG yang diterapkan di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan akan disesuaikan dengan teori menurut Wahyudin Zarkasyi. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip GCG diterapkan di KSPPS BMT BUS sudah selaras dengan teori atau belum, berikut perbandingannya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Perbandingan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

No	Aspek yang Dinilai	Menurut Teori Wahyudin Zarkasyi	Menurut KSPPS BMT BUS	Terlaksana	
				Ya	Tidak
1.	Transparansi	Kemudahan mengakses informasi	Adanya mobile BUS digital yang memudahkan anggota dalam mengakses dana yang dititikkannya.	√	
		Ketersediaan informasi	Adanya brosur yang disediakan KSPPS BMT BUS yang disitu terdapat informasi mengenai produk-produknya.	√	
		Kerahasiaaan informasi	KSPPS BMT BUS juga memiliki data-data yang tidak boleh diambil karena itu rahasia perusahaan.	√	
		Penyampaian kebijakan	KSPPS BMT BUS kebijakannya sudah ada secara tertulis dan disampaikan kepada semua pengelola serta diarsipkan dengan baik.	√	
		Visi dan misi organisasi	Visi dan misi sudah ada diwebsite dan kantor BMT BUS secara transparansi.	√	
2.	Akuntabilitas	Perincian tugas dan tanggung jawab	Adanya tupoksi yang disampaikan oleh semua karyawan maupun pengelola KSPPS BMT BUS.	√	

		Kompetensi yang sesuai	Dalam memberikan job ataupun jabatan dilihat dari pelatihan yang dilakukan selama 1 minggu dan lanjut OJT selama 3 bulan maka bisa dilihat bagian mana yang cocok untuk dia bekerja. Jadi tidak sesuai dengan permintaan karyawan akan tetapi dilihat bidang mana dia bisa bekerja. Terdapat rangkap jabatan seperti Karyawan bagian Marketing yang merangkap dengan bagian Relationship pembiayaan.		√
		Sistem pengendalian internal	Adanya audit internal setiap bulan untuk mengawasi kinerja dari karyawan maupun pengelola.		√
		Pengukuran kinerja	Dilihat dari pencapaian target yang sudah direncanakan.		√
		Pelaksanaan tugas sesuai pedoman	Sudah sesuai dengan SOP dan tupoksi yang ada.		√

3.	Responsibilitas	<p>Kepatuhan hukum</p> <p>Tanggung jawab sosial</p> <p>Prinsip kehati-hatian</p>	<p>Berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam membuat kebijakan peraturan perusahaan.</p> <p>Adanya pertanggungjawaban berjenjang dalam evaluasi pencapaian target baik itu kualitatif dan kuantitatif serta adanya baitul maall yang memberikan kemudahan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.</p> <p>Dalam memberikan pembiayaan selalu berpegang dengan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa calon anggota</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
4.	Independensi	<p>Dominasi dan pengaruh</p> <p>Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab</p>	<p>Dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif dan mengedepankan musyawarah.</p> <p>Sesuai dengan SOP yang ada dan bekerja secara profesional</p>	<p>√</p> <p>√</p>	

5.	Kesetaraan dan kewajaran	Kesempatan berpendapat Kesetaraan kompensasi Kesempatan karyawan	Memberikan kesempatan berpendapat dalam rapat-rapat yang Diadakan setiap bulan. Memberikan hak-hak yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Memberikan fasilitas yang sama kepada karyawan dan pelatihan untuk mengembangkan karirnya.	√ √ √	
----	--------------------------	--	--	---------------------	--

Sumber : Wahyudin Zarkasyi (2019)

Tabel di atas dapat dijabarkan bahwa KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sebagai lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip transparansi kepada anggotanya maupun kepada pemangku kepentingan yang lainnya. Dalam hal ini, KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan harus memudahkan dalam mengakses informasi untuk anggotanya, dengan adanya mobile BUS digital maka akan memudahkan anggota untuk mengecek dana yang dititipkan dengan melalui mobile BUS digital.

Dikarenakan masih adanya rangkap jabatan, untuk prinsip akuntabilitas pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dinilai kurang baik. Rangkap jabatan yang ditemui yaitu karyawan bagian marketing

juga menjadi relationship pembiayaan. Tentunya dengan adanya Rangkap jabatan akan melenceng dari prinsip “good governance”, Konflik kepentingan (conflict of interest) memungkinkan akan muncul akibat dari rangkap jabatan, yakni seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengetahuan karyawan yang minim mengenai prinsip GCG yang dapat menjadi hambatan saat menjalankan prinsip GCG dengan baik.

Prinsip responsibilitas sesuai dengan tabel perbandingan diatas dapat dijelaskan lebih rinci yaitu KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam menjalankan bisnisnya, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedomannya dan adanya pertanggungjawaban berjenjang dalam evaluasi pencapaian target baik itu kualitatif dan kuantitatif serta dalam memberikan pembiayaan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menganalisa calon anggota yang mengajukan pembiayaan yang akan mengakibatkan kredit macet jika adanya kesalahan menganalisa.

Untuk prinsip independensi itu sendiri lebih rinci dijelaskan bahwa pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif dan mengedepankan musyawarah serta bekerja sesuai dengan SOP yang ada dan bekerja secara profesional.

Prinsip kesetaraan dan kewajaran sesuai dengan tabel perbandingan diatas dapat dijelaskan lebih rinci bahwa KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan selalu memberikan kesempatan berpendapat kepada para pemangku kepentingan dengan adanya rapat setiap bulan dan selalu memberikan hak-hak yang sama kepada anggotanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya serta tidak membedakan kesempatan para karyawan untuk mengembangkan karirnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG pada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan belum dapat dinilai baik secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena masih terdapat indikator yang belum sesuai yaitu pada prinsip akuntabilitas, maka perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Pada umumnya dalam menerapkan GCG, faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Namun, kendala dalam penerapan GCG di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan hanyalah faktor internal yang menjadi masalahnya yaitu berasal dari lembaga itu sendiri. Masalah yang dimaksud ialah naik turunnya kedisiplinan karyawan. Jika karyawan telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, sehingga hal tersebut bukanlah kendalanya.

Hasil pemaparan analisis dan Pembahasan diatas peneliti mempunyai asumsi bahwa prinsip-prinsip GCG bahwa KSPPS BMT

BUS Cabang Lamongan telah diterapkan yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Prinsip GCG sudah semaksimal mungkin diterapkan dengan baik oleh KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam setiap kegiatan perusahaan, akan tetapi masih juga ditemukan tidak maksimalnya pelaksanaan sebuah prinsip yaitu akuntabilitas. dimana persoalan utamanya adalah masih ditemui Rangkap Jabatan dalam tubuh KSPPS BMT BUS tersebut, yang tentunya hal tersebut melenceng dari prinsip-prinsip “good governance”. Konflik kepentingan (conflict of interest) dapat muncul akibat dari rangkap jabatan, yakni seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara dalam hal Kendala atau Hambatan yang ditemui ketika mengimplementasikan Good Corporate Governance di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan ialah dari faktor internal yaitu naik turunnya kedisiplinan karyawan saat melaksanakan tugasnya, dimana dampak ketidakdisiplinan karyawan terhadap Good Corporate Governance dapat signifikan dan berpotensi merugikan perusahaan. Good Corporate Governance sendiri menjadi prinsip dan praktik dalam mengelola perusahaan yang baik dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kebijakan yang adil kepada semua stakeholders. Berikut adalah beberapa dampak negatif ketidakdisiplinan karyawan terhadap Good Corporate Governance :

1. Pelanggaran Kebijakan Perusahaan: Ketidaksiplinan karyawan dalam mengikuti kebijakan perusahaan, seperti memalsukan dokumen, mengabaikan prosedur operasional, atau menghindari pengawasan, dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan. Hal ini dapat merusak integritas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, dan dapat menjadi contoh buruk bagi karyawan lain, serta merusak citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan.
2. Penyimpangan Etika: Ketidaksiplinan karyawan dalam menjalankan etika bisnis yang baik, seperti melakukan tindakan korupsi, nepotisme, atau konflik kepentingan, dapat merusak prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam GCG. Penyimpangan etika juga dapat merusak hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat.
3. Kerugian Keuangan: Ketidaksiplinan karyawan dalam mengelola keuangan perusahaan, seperti penggelapan dana, penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau tindakan korupsi, dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan. Hal ini dapat merusak keberlanjutan perusahaan, mempengaruhi kinerja keuangan, dan merugikan pemegang saham.
4. Ketidakpatuhan Regulasi: Ketidaksiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, baik itu hukum

perusahaan, peraturan pemerintah, atau ketentuan industri, dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan sanksi hukum. Ketidapatuhan regulasi dapat merusak reputasi perusahaan, mempengaruhi hubungan dengan pihak berwenang, dan berpotensi merugikan operasional perusahaan.

5. Gangguan Internal: Ketidaksiplinan karyawan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dapat mengakibatkan gangguan internal dalam operasional perusahaan, seperti keterlambatan dalam pengambilan keputusan, penurunan produktivitas, atau kualitas kerja yang buruk. Hal ini dapat merusak efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, serta dapat mengganggu hubungan antara tim kerja dan manajemen perusahaan.

Upayanya adalah dengan membuat tata tertib yang mewajibkan karyawan sebelum pukul 8 sudah hadir di kantor dan karyawan yang memiliki disiplin tinggi akan diberi reward.

Sebagaimana Hasil Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pihak KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan, Berikut merupakan beberapa cara KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam menangani masalah ketidaksiplinan karyawan:

1. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas: Kebijakan dan prosedur yang jelas terkait tata kelola perusahaan, etika bisnis, tata tertib kerja,

dan aturan-aturan internal lainnya harus dimiliki oleh KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan. Kebijakan dan prosedur ini harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh karyawan, dan harus diikuti dengan konsekuensi yang jelas bagi pelanggarannya.

2. Melakukan Pelatihan dan Pendidikan: Pelatihan dan pendidikan kepada karyawan mengenai pentingnya disiplin kerja, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis, dan konsekuensi dari ketidakdisiplinan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap pentingnya disiplin kerja dalam lingkungan perusahaan.
3. Menerapkan Sistem Pengawasan: Sistem pengawasan yang efektif dapat membantu memantau perilaku dan tindakan karyawan, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakdisiplinan. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme seperti audit internal, pengawasan manajemen, dan penerapan teknologi informasi yang dapat memantau aktivitas karyawan.
4. Memberikan Insentif dan Sanksi: Insentif dan sanksi yang jelas dapat menjadi penggerak motivasi bagi karyawan untuk disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Insentif dapat berupa penghargaan, bonus, atau fasilitas lain sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik, sedangkan sanksi harus konsisten dan diterapkan dengan adil jika terjadi pelanggaran atau ketidakdisiplinan.

5. Membangun Budaya Perusahaan yang Berbasis pada Disiplin: Membangun budaya perusahaan yang berbasis pada disiplin kerja, integritas, dan etika bisnis yang baik dapat membentuk norma dan nilai yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Kepemimpinan perusahaan harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi disiplin kerja dan mengintegrasikannya dalam seluruh aspek operasional perusahaan.
6. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala: Perusahaan harus secara teratur memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan, serta efektivitas upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakdisiplinan karyawan. Evaluasi ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul, mengambil tindakan perbaikan, dan memastikan bahwa disiplin kerja dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tetap dijaga dengan baik.

Menurut Peneliti, Upaya yang konsisten dan berkelanjutan dari KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan karyawan adalah langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mengelola perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai prinsip dasarnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut temuan penelitian yang sudah diuraikan di atas, bisa disimpulkan :

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan usai terselenggara, menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) seperti transparency, akuntability, responsibility, independen, fairness. KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance*(GCG) pada setiap tindakan upayanya akan tetapi juga ditemukan tidak maksimalnya pelaksanaan sebuah prinsip yaitu akuntabilitas.
2. Kendala ketika menerapkan *Good Corporate Governance*(GCG) pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera(BUS) Cabang Lamongan ialah dari faktor internal yaitu naik turunnya kedisiplinan karyawan saat melaksanakan tugasnya, kendala tersebut diatasi dengan upaya membuat tata tertib yang mewajibkan karyawan sebelum pukul 8 sudah hadir di kantor dan karyawan yang memiliki disiplin tinggi akan diberi reward.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, lalu saran dari peneliti yang berhasil dihasilkan menjadi masukan pada KSPPS BMT BUS seperti dibawah ini:

1. Penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) di BMT BUS mampu bertambah ditingkatkan lagi untuk memajukan kepercayaan masyarakat beserta calon anggota, serta BMT BUS akan semakin berkembang dan maju karena memiliki banyak cabang.
2. Pimpinan KSPPS BMT BUS diharapkan senantiasa melakukan controlling dan memberi motivasi kepada pegawai, sekaligus membina anggotanya untuk membentuk karakter mereka yang selaras dengan budaya kinerja yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan perusahaan. Selain itu, diharapkan juga untuk secara berkala mengevaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap sistem tata kelola kelembagaan dan tumbuhnya keinginan untuk meningkatkan kualitas GCG dengan baik.
3. BMT BUS Cabang Lamongan telah semaksimal mungkin dalam berusaha untuk menerapkan *Good Corporate Governance*(GCG) sesuai melalui pedoman yang ada, bersama itu perlu adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan agar jauh lebih baik lagi serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
4. SDM dari KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sebaiknya ditambah dan disesuaikan dengan bidang yang dibutuhkan untuk menghindari

terjadinya perangkapan jabatan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Az-Ruzz Media.
- Aini, Rizka N & Pratikto, M. Iqbal Surya. (2021). “Analisis Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Melalui Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Tahun 2015-2019 (Studi pada PT Bank Syariah Bukopin (Persero) Tbk)”. *Jurnal kajian Ekonomi dan Perbankan*. 5(1)
- Ardianto, P. (2021). Pertumbuhan Laba Bersih Multifinance Diproyeksi Berlanjut di 2022. <https://www.investor.co.id> Diakses November 2022.
- bin Lahuri, S., & Vina Fitria W. (2020). Analysis Of Implementation Of The Corporate Governance PT Bank Bni Syariah Branch Of Tasikmalaya. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Budi Sulistiyo, A., & Dkk. (2020). Effect Of Islamic Corporate Governance On Customer Trust: Empirical Study On Islamic Bank. *Jurnal Manajemen Islam Asia (AJIM)*, 2(1).
- Buchori, Imam & Rohmatu, Sa'diah. (2017). Analisis Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Governance , Earnings and Capital) dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016. *Jurnal el-Qist*, 7(2).
- Denzin, N. K., & Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Penerbit Jumanatul Ali.
- Fitri Khasanah, D. (2012). Analisis Kepatuhan Syaria"ah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syaria"ah KCP Mikro Lamongan. *Jurnal Progres Convergence*, 1(1).

- Forum For Corporate Governance in Indonesia. (2022, November).
Www.Fcgi.or.Id Diakses November 2022.
- Harahap, R. S. (2018). *Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Risk Based Bank Rating Dalam Memprediksi Financial Distress Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Universitas Sumatra Utara.
- JavanLabs. (2022, November). Tafsir Al-Qur'an Online. Www.Tafsirq.Com
Diakses November 2022.
- Jessica L, J., & Dkk. (2017). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Kemenkeu Corprat University. (2022). KEMENKEU LEARNING.
Www.Klndepkeu.Tripod.Com Diakses November 2022.
- Kusmayadi, D. (2015). GOOD CORPORATE GOVERNANCE. LPPM
Universitas Siliwangi.
- Kusuma Bhakti, D. (2017). *Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Situbondo*. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Lailany, D., & Isfandayani. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Bank BRI Syariah Pusat . *Jurnal Masalah*, 9(1).
- Lusi Tania, A., & Liana Dewi S. (2017). Analisis Good Corporate Governance pada bank syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Maradita, A. (2014). *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. *Yuridika*, 29(2).
- Mustofa, Imam Ali, dkk. (2020). Analysis of the Health Level of BRI Sharia Bank Through RGEC Method From 2016 to 2020. *Jurnal el-Qist*, 08(02).
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

- Nasution, M., & Setiawan, D. (2007). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). <http://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perbankan Syariah (SPS). [Https://Ojk.Go.Id](https://Ojk.Go.Id).
- Pratikto, M. Iqbal Surya, dkk. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Melalui Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) TAHUN 2014-2018 (Studi Pada PT Bank BRI Syariah (persero) Tbk). *Jurnal el-Qist*, 9(2).
- PT. Bank Syariah Indonesi. (2022). Bank Syariah Indonesia. [Http://Ir.BankKSPPS.BUS.Co.Id/Corporate_history.Html](http://Ir.BankKSPPS.BUS.Co.Id/Corporate_history.Html) Diakses November 2022.
- Putri, I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(2).
- Salim, Agus. 2018. (2018). Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekomadania* , 1(2).
- Sapta Pratama, E. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Www.Setkab.Go.Id Diakses November 2022.
- Soehartono, I. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2012). *Corporate Governance Governance*. Sinar Grafika.